

LAPORAN PENELITIAN

PERAN KOMUNIKASI POLITIK ISLAM DI INDONESIA

(Kajian Masa Pemerintahan Orde Baru dan Reformasi)

OLEH

HASAN SAZALI, M.Ag

NIP. 19760222 200701 1 018

Konsultan

Prof. Dr. H. Syukur Khalil

Nip : 19640209 1989 03 2 002

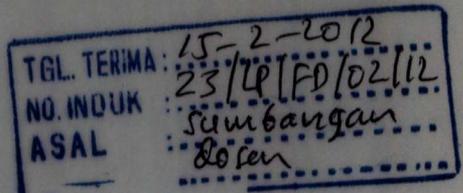


FAKULTAS DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2012



P  
2x6.2  
SAZ  
p  
6-1

LAPORAN PENELITIAN

PERAN KOMUNIKASI POLITIK ISLAM DI INDONESIA

(Kajian Masa Pemerintahan Orde Baru dan Reformasi)

OLEH



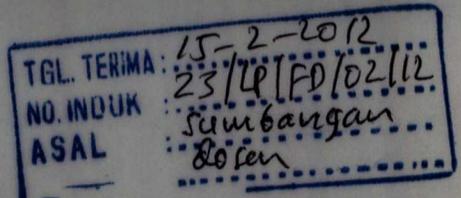
HASAN SAZALI, M.Ag

NIP. 19760222 200701 1 018

Konsultan

Prof. Dr. H. Syukur Khalil

Nip : 19640209 1989 03 2 002



P  
2 x 6.2  
SAZ  
p.  
1

FAKULTAS DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2012



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kemauan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat safaat beliau di hari akhir nanti.

Laporan penelitian ini dibuat untuk menambah wawasan tentang kajian komunikasi politik khususnya buat civitas akademika IAIN Sumatera Utara. Dewasa ini perbincangan komunikasi politik semakin banyak dilakukan, mulai dari kalangan akademisi sampai dengan kalangan aktifis, khususnya komunikasi politik umat Islam Indonesia.

Peneliti menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan terutama dalam laporan penyajian penelitian ini, untuk itu peneliti dengan tangan terbuka menerima keritikan dan saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan dan perluasan ilmu pengetahuan terutama bidang komunikasi politik.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memantu dalam penulisan penelitian ini, terutama istri tercinta, Bapak Dekan, Konsultan Peneliti, rekan-rekan khususnya adinda Joko Susanto, yang telah meminjamkan penulis buku-buku komunikasi politiknya, serta seluruh civitas akademika Fakultas Dakwah yang banyak memberikan dukungan dan motivasi demi penyelesaian penelitian ini. Akhirnya peneliti mengucapkan ribuan terimakasih yang tak terhingga semoga Allah membalas lebih apa yang diberikan kepada peneliti.

Wassalam

Peneliti

Hasan Sazali, M.Ag

## ABSTRAKSI

**Judul: PERAN KOMUNIKASI POLITIK UMAT ISLAM INDONESIA  
(KAJIAN PEMERINTAHAN ORDE BARU DAN REFORMASI)**

Dengan memperbanyak intensitas komunikasi politik yang dilakukan umat Islam kepada pemerintah, intensitas yang dilakukan lebih kepada merekonstruksi pencitraan politik Islam sebagai suatu kekuatan di mata penguasa. Pencitraan yang dibangun dalam aktifitas komunikasi politik dengan ikut berperan aktif dalam sistem pemerintahan walaupun umat Islam sebagai kekuatan politik lebih melakukan strategi politik substansialistik, hal ini terkesan lebih elegan dan sesuai dengan perkembangan situasi politik pada saat itu, di mana pemerintah masih menganggap Islam sebagai "ekstrem kanan" yang harus tetap diwaspadai. Bentuk komunikasi yang dibangun masih dalam tataran propaganda politik, di mana lebih persuasif dalam melakukan tindakan-tindakan kebijakan politik.

Pada masa Reformasi terlepas dari perdebatan "Islam Struktural" dan "Islam Kultural" kehadiran parpol Islam secara praktis memang dibutuhkan, bukan sekedar untuk menjamin adanya perwakilan aspirasi umat, tetapi juga untuk mewarnai konstelasi komunikasi politik dengan nuansa religius. Ada beberapa pihak yang ingin membetulkan letak persoalan kekalahan umat Islam dalam pemilu 1999, yakni dengan mengatakan yang kalah itu bukanlah Islam tetapi partai-partai Islam, sementara umat Islam ada yang menang dan ada yang kalah, tergantung kepada partai mana yang mereka pilih. Ungkapan yang bernada *apologetic* dan cenderung berupaya melepaskan beban dan tanggung jawab moral terhadap kekalahan umat Islam.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembaran Identitas dan Pengesahan .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
Abstraksi .....	iv
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pengertian Istilah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Metode Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II Kerangka Teori</b>	
<b>Paradigma Komunikasi Politik Islam</b>	
A. Politik Dalam Pandangan Alquran.....	12
B. Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah.....	15
1. Priode Klasik .....	16
2. Periode Pertengahan .....	28
3. Periode Moderen .....	30
C. Komunikasi Politik .....	33
C.1 Bentuk-Bentuk Komunikasi Politik .....	35
C.1.1 Rethorika dan Agitasi Politik .....	35
C.1.2 Propaganda Politik .....	37
C.1.3 Public Realation Politik .....	38
C.1.4 Periklanan Politik .....	39
<b>BAB III Peran Komunikasi Politik Umat Islam Indonesia</b>	
A. Pandangan Pemikir Islam Tentang Komunikasi Poltik Islam .....	40
1. Masa Pemerintahan Orde Baru .....	40
2. Masa Pemerintaha Reformasi .....	48
B. Peran Komunikasi Politik Islam .....	52
1. Masa Pemerintahan Orde Baru .....	52
2. Masa Pemerintahan Reformasi .....	31
C. Masyarakat Madani dan Implementasinya di Indonesia .....	68
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	78

## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi Politik Islam sudah mulai diperdebatkan setelah Rasulullah SAW wafat. Pertemuan antara Muhajirin dan Anshor di Saqifah bani Sa'idah merupakan rapat paripurna nasional atau sidang konstituante pertama yang membicarakan masalah kepemimpinan dalam Islam<sup>1</sup>. Dalam perkembangan selanjutnya banyak politikus muslim yang membicarakan tentang politik Islam.

Ibnu Abi Rabi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Al-mawardi memandang bahwa kekuasaan kepala Negara atau raja merupakan mandate Allah yang diserahkan kepada hamba-hamba-Nya sehingga kepala Negara atau raja merupakan khalifah Allah di muka bumi<sup>2</sup>. Bahkan kekuasaan khalifah itu menurut Al-Ghazali adalah *muqaddas* atau suci, dengan pengertian tidak dapat diganggu gugat, sedangkan menurut Al-Mawardi kekuasaan kepala Negara itu didasarkan atas kontrak social yang melahirkan hak dan kewajiban atas dasar timbale balik bagi rakyat dan raja. Sementara itu, Al-Maududi memberikan konsep dasar yang menegaskan bahwa kedaulatan ada ditangan Tuhan bukan dutangan manusia<sup>3</sup>. Jadi berbeda dengan teori demokrasi pada umumnya yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat, dalam kenyataannya kata-kata

---

<sup>1</sup> Fuad Muhammad Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1988, Hal. 61-62.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Thaha, *Islam dan Negara*, Gema Insan Press, Jakarta, 1996, Hal. 109

<sup>3</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan* (Terjemah. Muhammad Al-Baqir) Mizan, Bandung, 1996, Hal. 20.

"Kedaulatan rakyat" sering kali menjadi kata-kata kosong karena partisipasi rakyat dalam Negara demokrasi hanyalah dilakukan empat atau lima tahun sekali dalam bentuk panitia dalam hal ini peran rakyat dapat dibilang tidak ada.

Untuk membentuk tatanan masyarakat ideal Al-qur'an dan As-Sunnah memberikan pedoman kepada umat Islam terutama menyangkut ketentuan-ketentuan dasar dalam berpolitik dan bernegara. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun meyakini bahwa dasar kebijakan dan peraturan Negara seharusnya berasal dari ajaran dan hukum agama, bukan sebaliknya hasil karya manusia<sup>4</sup>. Dalam menjalankan kebijakan dan peraturan Negara, secara teoritis, umat Islam bingung menghadapi fenomena yang sering muncul dewasa ini, sebab sebelumnya belum pernah dikenal dalam bangunan kekuasaan Islam. Persoalan-persoalan krusial adalah bagaimana cara mengawinkan doktrin universalisme Islam yang digali dari ajaran Islam dan hukum agama, dengan gagasan sebuah sistem pemerintahan yang diterapkan melalui suatu konsep yang diimpor dari Barat.

Melihat kondisi umat Islam di Indonesia sekarang sudah seharusnya mampu mengadakan kompensasi penerapan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melangsungkan posisi kekhalifahan di muka bumi sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an. Islam sebagai suatu agama dengan kompleksitas ajarannya harus mampu memainkan peran yang ideal dalam strategi politik pembangunan bangsa dan pembangunan umat Islam.

Kegagalan umat Islam dalam memainkan peran komunikasi perpolitikan di Indonesia terjadi diawal kemerdekaan, yang intinya terlihat pada ketidak berhasilan mereka menjadikan Islam sebagai Ideologi Negara. Ini merupakan

---

<sup>4</sup> Fuad Muhammad Fachruddin, *Op.Cit*, hal. 110.

suatu kenyataan yang pahit, yang dampaknya berlanjut sampai hari ini. Tampaknya kondisi seperti itu disebabkan oleh ketidaksiapan para pemimpin Islam untuk menciptakan suatu manuver-manuver politik yang menyakinkan semua pihak, tentang konsepsi politik Islam yang jelas, misalnya gagasan tentang "*Baldatun Thayibatun Warabbun Ghafur*".

Pada masa Orde Baru peran perpolitikan Islam bahkan memberikan suatu gambaran yang sangat tidak menguntungkan. Partai-partai politik Islam ketika itu tidak konsekwen terhadap institusi Islam itu sendiri melainkan hanya kepada partai Islam, terlepas dari persoalan tersendental yang melatarbelakanginya. Hal ini mengindikasikan bahwa para pemimpin partai politik Islam tidak mencerminkan penyaluran aspirasi umat Islam secara keseluruhan melainkan untuk menyalurkan aspirasi kelompok Islam tertentu, sehingga umat Islam menjadi terkotak-kotak menurut aliran mazhab atau ormas yang ada waktu itu. Bahkan ada elemen-elemen Islam yang terlibat di dalam korupsi, manipulasi, dan sebagainya. Akibatnya timbul satu ungkapan seorang tokoh Intelektual Islam (Nurkholis Majid) "*Islam ye, partai Islam no*".

Dengan gagasan ini jelas terlihat komitmen Nurkholis pada era dekade tahun 70-an kepada Islam, bukan kepada institusi keislaman. Karena penolakan terhadap institusi kepartaian politik Islam harus dipahami sebagai penolakan bukan karena Islamnya, tetapi penolakan terhadap pemantapan atas Islam oleh mereka yang terlibat di dalam kegiatan partai politik Islam. Tingkah laku pemantapan terhadap Islam secara demikian ini, menurut Nurkholis, justru menjatuhkan nilai-nilai ajaran Islam.

Pada era reformasi ada suatu kecenderungan, baik dari pemerintah maupun kalangan lain, untuk tidak membiarkan partai bisa berazaskan selain Pancasila<sup>5</sup>. Dalam arti yang agak keras partai Islam lama dan baru akan tetap terkedala, apalagi di kalangan aparat pemerintahan sendiri dan pakar tertentu ada ketidaksetujuan mereka terhadap partai yang bercirikan SARA (suku, agama, ras). Ini berarti partai Islam akan tetap menjadi momok bagi mereka.

Kita semua menyadari era kebangkitan Islam dalam era reformasi ini akan menjadi lahan subur kekuatan partai Islam. Akan tetapi yang menjadi persoalan, mampukah partai politik Islam memaminkan peranannya dalam menyikapi reformasi secara gradual dan memenuhi segala tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian ada suatu tantangan yang dihadapi partai Islam, dalam mereformasi peran komunikasi politik Islam. Karena itu muncul kekhawatiran, bukan saja terjadi perebutan lahan yang sama, akan tetapi ada kemungkinan muncul friksi (perpecahan) yang tajam dikalangan umat akibat kepentingan para elit politik pemimpin umat<sup>6</sup>.

Jika partai politik Islam tidak mampu memainkan peranan komunikasinya dalam menyikapi perkembangan dengan cara melakukan reformasi secara mendasar, mulai dari reformasi garis perjuangan partai sampai kepada visi partai politik Islam dalam mewujudkan suatu kondisi masyarakat madani, maka reformasi sikap dan moral partai itu kan menjadi suatu khayalan semata dan umat Islam kembali lagi mengulangi kegagalan pada masa lalu.

---

<sup>5</sup> Al-Chaidar, *Reformasi Prematur*, Darul Falah, Jakarta, 1998, hal.160

<sup>6</sup> *Ibid*, hal.162

Dari uraian diatas, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana peran komunikasi partai politik Islam di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru dan Reformasi?
2. Bagaimana hakekat visi komunikasi politik Islam di Indonesia dalam menyikapi reformasi secara global dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang konduktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

## **B. Pengertian Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan istilah bagi pembaca, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang dapat di dalam judul penelitian ini, yaitu "Peran Komunikasi Politik Umat Islam di Indonesia (Kajian Masa Pemerintahan Orde Baru dan Reformasi), Istilah-istilah yang perlu dijelaskan :

### **1. Peran Komunikasi Politik**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, peran berarti sesuatu yang jadi bahagian atau yang memegang pimpinan utama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa<sup>7</sup>. Sementara istilah Komunikasi Politik merupakan suatu kajian ilmu pengetahuan yang dibangun dari berbagai disiplin ilmu, terutama komunikasi dan politik. Antara komunikasi dan politi memiliki hubungan yang sangat erat saling mendukung satu dengan yang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa, kehidupan politik tentunya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan komunioutput dialirkan

---

<sup>7</sup> W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hal. 734

kembali karena pada dasarnya proses politik dapat diekspresikan dalam proses politik.<sup>8</sup>

Michael Rush dan Philip Althoff memberikan rumusan Komunikasi Politik sebagai suatu proses dimana informasi partai politik yang relevan diteruskan dari suatu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Hal ini menunjukkan bahwa Komunikasi Politik dapat diibaratkan sebagai layaknya darah yang mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan dan dukungan (aspirasi dan kepentingan masyarakat) jantung (pusat) pemrosesan sistem politik. Dan hasil pemrosesan tersebut yang tersimpul dalam fungsi-fungsi output dialirkan kembali menjadi umpan balik ke sistem politik. Itulah, komunikasi politik menjadi sistem politik hidup dan tumbuh secara dinamis.<sup>9</sup>

Komunikasi Politik jika dikaitkan dengan partai politik memiliki pengertian, yaitu : segala kegiatan menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa "Penggabungan kepentingan" (*interest aggregation*) dan "Perumusan kepentingan" untuk diperjuangkan menjadi *public policy*<sup>10</sup>

Kajian tentang komunikasi politik menunjukkan pesan politik sebagai objek formalnya. Sehingga titik berat konsep komunikasi politik terletak pada komunikasi dan bukan pada politik. Komunikasi politik difahami sebagai proses

---

<sup>8</sup>. Hafied Canggara, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 16.

<sup>9</sup>. Etin Nurhaetin Ningrum, *Dinamika Suara Partai & Strategi Pemenangan Pemilu*, Kencana Mas Publishing ouse, Jakarta, 2005, hlm. 21

<sup>10</sup>. Meriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 405

pemindahan (transfer) atau pertukaran (exchange) informasi atau pesan<sup>11</sup>. Pemahaman ini menjelaskan bahwa komunikasi politik merupakan penyampaian pesan-pesan tentang politik kepada audience

Merujuk kembali kepada kajian komunikasi politik, bahwa dalam suatu negara demokratis, memandang bahwa salah satu komponen penting dalam komunikasi politik adalah institusi politik dengan aspek komunikasinya, institusi politik dalam hal ini diartikan sebagai lembaga atau organisasi yang bersifat politik, yaitu partai politik, dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukannya baik ke dalam partai maupun di luar partai yang memiliki keterkaitan dengan institusi kenegaraan.

Partai politik merupakan organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut simpati rakyat dalam bentuk dukungan dengan melalui persingan baik satu golongan maupun berbagai golongan yang memiliki sudut pandang ideologi politik yang berbeda.

Berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksudkan dengan peran komunikasi politik adalah keikutsertaan komunikasi perpolitikan umat Islam di dalam suatu sistem pemerintahan yang diterapkan di dalam Negara Republik Indonesia.

## 2. Umat Islam Indonesia

Umat Islam Indonesia terdiri dari tiga kata, yaitu umat, Islam dan Indonesia. Umat berarti para penganut suatu agama, khalayak ramai, publik<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup>. Don F-R Wayne Pace Faules, *Komunikasi Organisasi; Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, Rosda Karya, Bandung, 2006, hlm. 28

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1988, hal.457.

Islam adalah suatu agama samawai yang menanggulangi masalah-masalah kehidupan, tidak secara sebagian-bahagian dan tidak menilai setiap masalah sebagai kenyataan yang berdiri sendiri tanpa ada hubungan masalah yang lain. Islam mengembalikan semua itu pada suatu titik pusat membuat semuanya itu berputar disekitar satu proses. Hubungannya dengan poros itu diperkokoh oleh jaringan-jaringan baik yang tampak jelas maupun samar-samar, tetapi kesemuanya itu bekerja dalam satu kesatuan yang bersifat menyeluruh dan universal<sup>13</sup>. Hampir sama dengan pengertian diatas, Harun Nasution menyatakan bahwa Islam adalah agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai rasul. Islam pada hakekatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu aspek, akan tetapi mengenai berbagai aspek kehidupan manusia, yang sumber ajaran-ajarannya diambil dari Al-qur'an dan Al-hadits<sup>14</sup>.

Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di benua Asia dan Benua Asutralia. Negara kepulauan mempunyai bayak sekali suku serta kebudayaan yang beragam. Kedudukan kepulauannya sangat strategis didalam perkembangan sosial dan politik negara<sup>15</sup>.

Dengan demikian, pengertian umat Islam Indonesia disini dibatasi, mereka yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara kelompok (melalui partai politik) maupun secara pribadi.

---

<sup>13</sup> Sayyid Qutub, *Islam dan Perdamaian Dunia* (terjemahan Asep Hikmat), Pustaka Firdaus, Jakarta, 1987, hal.7.

<sup>14</sup> Harun NASution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*, Jilid I, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985, hal.24

<sup>15</sup> W.J.S. Poerwardarminta, *Op.Cit*, hal.320

### 3. Masa Pemerintahan Orde Baru dan Reformasi

Yang dimaksudkan dengan masa pemerintahan Orde Baru adalah masa berlakunya sistem pemerintahan di Indonesia setelah runtuhnya rezim Orde Lama dipimpin Presiden Ir. Soekarno yang mulai pada tanggal 5 Juni 1966 dan berakhir pada runtuhnya rezim Orde Baru ditandai dengan lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998<sup>16</sup>. Sementara yang dimaksudkan masa pemerintahan Reformasi ialah masa pemerintahan transisi yang dimulai semenjak dilantikannya Prof. Dr. B.J.Habibi sebagai Presiden Republic Indonesia pada tanggal 22 Mei 1998, sampai dengan terpilih dan dilantikannya KH.Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke empat pada tanggal 21 Oktober 1999

#### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi adalah:

1. Untuk mengemukakan peran komunikasi politik umat Islam di Indonesia pada masa Orde Baru dan era Reformasi.
2. Untuk melihat hakekat visi komunikasi politik umat Islam Indonesia dalam menyikapi Reformasi secara gradual (keseluruhan) dalam mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>16</sup> Al-Chaidar, *Op.Cit*, hal.20-21

#### D. Metode Penelitian

Ddalam rangka menyelesaikan penulisan penelitian ini, cara yang digunakan adalah menguji buku-buku yang ditulis oleh para ilmuwan terkemuka dengan menggunakan metode kualitatif.

Metode tersebut diterapkan dalam penelitian yang desainnya bertolak dari kerangka teoritik yang dibangun dari permukaan hasil penelitian terdahulu, teor-teori yang sudah ada, hasil-hasil pikiran para pakar dan dikonstruksikan menjadi suatu yang mengandung sejumlah problematika yang perlu diteliti lebih lanjut<sup>17</sup>. Dalam menyelesaikan sejumlah problematika penelitian ini menggunakan methode analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya<sup>18</sup>. Dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan peran komunikasi politik Islam pada masa pemerintahan Orde Baru dan Reformasi.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah, mengumpulkan buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan penelitian yang merupakan data primer di dalam penelitian ini.

#### E. Sistimatika Penulisan

Sistimatika penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan. Disini dijelaskan, latar belakang masalah, pengertian istilah, tujuan penelitian, metode pembahasan dan sistematika penulisan.

---

<sup>17</sup> Noeng Muhajir, *Methodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarahi. Yogyakarta, Cet. II, 1990, hal.133

<sup>18</sup> Suharsimi Ari kunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal.208.

Bab Kerangka Teori mengkaji tentang Politik dalam Al-Qur'an dan politik Islam dalam lintas sejarah, yang pembahasannya dimulai dari politik priode Islam klasik, priode Islam pertengahan, priode politik Islam modern. Komunikasi Politik, bentuk-bentuk komunikasi politik. Bab ketiga merupakan hasil penelitian. Disini dikemukakan peran komunikasi politik umat Islam dindonesia kajian pemerintahan Orde Baru dan Reformasi, yang penjelasannya meliputi pandangan pemikir Islam tentang konsep komunikasi politik Islam masa pemerintahan Orde Baru dan Reformasi, peran komunikasi politik Islam dibawah pemerintahan Orde Baru dan Reformasi, masyarakat Madani dan Implementasinya di Indonesia.

Bab empat yang membuat beberapa kesimpulan yang merupakan saripati dari penelitian ini dan dilanjutkan beberapa saran yang diperlukan untuk menjadi bahan pemikiran dan kajian selanjutnya.

## BAB DUA

### KERANGKA TEORI

#### PARADIGMA KOMUNIKASI POLITIK ISLAM

##### A. Politik Dalam Pandangan Al-Qur'an

Al-qur'an merupakan suatu norma kehidupan yang sempurna untuk kehidupan manusia. Dia memiliki konsep etika politik, ekonomi dan masyarakat. Konsep politik yang terdapat dalam Al-qur'an menjadi suatu landasan normatif dalam sistem perpolitikan Islam yang memancar dari suatu pendekatan terhadap kehidupan dan kedudukan manusia di alam semesta<sup>19</sup>.

Konsep Islam mengenai kehidupan sebagaimana yang dipaparkan dalam Al-qur'an adalah bahwa harus membuktikan semua kehidupannya demi perintah Allah. Perintah-perintah Allah-lah yang harus diikuti dalam semua aspek kegiatan manusia. Al-qur'an tidak hanya meletakkan konsep-konsep yang menjadi norma dalam kehidupan, tetapi juga memberikan tuntunan serta menjatuhkan sanksi-sanksi bagi yang melanggar ketentuan norma-norma tersebut.<sup>20</sup>

Dalam Al-qur'an konsep politik yang paling mendasar dan paling revolusioner adalah konsep kedaulatan Tuhan atas segala kehidupan manusia. Sepanjang berkaitan dengan konsep ini benar. Konsep kedaulatan berdasarkan Al-qur'an sangat sederhana. Tuhan adalah pencipta dalam semesta, dia adalah pemelihara dan Penguasa sejati, karena itu, semua makhluk adalah milik-Nya.

---

<sup>19</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Sistem politik Islam* (Terjemahan Asep Hikmat), Mizan, Bandung, 1995, hal. 176

<sup>20</sup> *Ibid*, hal.186

Perintah-Nya juga harus ditegakkan serta ditaati dalam masyarakat manusia, sebagaimana firmanNya :

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٦﴾

Artinya : Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah (QS toha :6)

إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

Artinya : ...Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah...( QS. Al-An'am:57)

Pesan ini sama sekali membasmi syirik dalam semua bentuknya, dan pemikiran ini secara alamiah juga mengandung konsekwensi bahwa hanya Dia sajalah yang harus dipatuhi. Dia sendirilah yang merupakan pemberi hukum, yang memiliki undang-undang otoritas. Semua hak preogratif ini hanya khusus milik Dia. Dan Dia telah memerintahkan agar perintah-Nya ditempatkan pada kedudukan tertinggi dan undang-undang-Nya yang harus dilaksanakan.<sup>21</sup>

Dalam persoalan kekhalifahan yang dijelaskan dalam Al-qur'an ialah bahwa segala sesuatu di atas bumi ini berupa daya dan kemampuan yang diperoleh oleh seorang manusia hanyalah karunia dari Allah SWT. Dan Allah telah menjadikan manusia sebagai Khalifah untuk dapat menjalankan perundang-undangan yang telah ditetapkan-Nya. Berdasarkan hal ini, maka manusia

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hal.476

bukanlah penguasa, atau pemilik dirinya sendiri, tetapi ia hanyalah khalifah atau wakil sang pemilik sebenarnya.<sup>22</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi (QS. Albaqarah : 30)

Namun khalifah ini tidak menjadi khalifah yang benar selama tidak mengerti hukum sang pemilik yang sebenarnya. Adapun sistem pemerintahan yang memalingkan diri dari Allah, lalu menjadi sistem yang terlepas bebas, memrintah dengan dirinya sendiri, maka itu bukanlah khalifah, tetapi itu adalah pemberontakan atau kudeta melawan penguasa yang hakiki.<sup>23</sup>

Kekuasaan politik adalah amanah yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia. Penganugerahan ini dilakukan melalui satu perjanjian. Ikatan ini terjalin antara sang penguasa dengan Allah SWT. Satu pihak dan dengan masyarakatnya di pihak lain. Perjanjian baik antara sang penguasa dengan masyarakat maupun antara dia dengan yang mahakuasa merupakan amanat yang harus ditunaikan. Dari sini, tidak heran jika perintah taat kepada penguasa (ulil amr) di dahului oleh perintah menunaikan amanah,<sup>24</sup> sebagaimana firman Allah;

---

<sup>22</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, (Terjemah, Muhammad Al-Baqir), Mizan, Bandung, 1996, hal.64

<sup>23</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Op-cit*, hal.67

<sup>24</sup> M. Qurais Shihab, *Wawasan Al-qur'an*, Mizan, Bandung, Cet, VIII, 1998, hal. 425

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ

اللَّهُ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.<sup>25</sup>*

## **B. Politik Islam dalam Lintas Sejarah.**

Abdul Aziz Thabab dalam tulisannya membagi sejarah pemikiran politik Islam kepada tiga periode, yaitu masa klasik, masa pertengahan dan masa modern, tetapi ia tidak memberikan batasan yang jelas tentang periode-periode tersebut.<sup>26</sup> Harun Nasution membagi perkembangan sejarah politik Islam kepada tiga periode juga, akan tetapi periode-periode tersebut mempunyai ciri-ciri dan kekhususan masing-masing dengan disertai pembatasan yang jelas.

Periode klasik dimulai tahun 650-1259 M. Periode ini merupakan masa ekspansi, integrasi dan puncak kemajuan Islam. Dunia ilmu pengetahuan mengalami masa kemajuannya.<sup>27</sup> Pusat pemerintahan Islam pada masa ini berkedudukan di Madinah, Damasyik dan Baghdad. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka lahirlah ilmuwan-ilmuwan besar. Ilmuwan yang pertama kali mengemukakan teori politik adalah Ibnu Abi Rabi, kemudian menyusul pemikir-

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Op-Cit*, hal.128

<sup>26</sup> Abdul Aziz Thaha, *Islam dan Negara*, Graha Insani Pres, Jakarta, 1996, hal. 109

<sup>27</sup> Munawir Sadzali, *Islam dan Tatanegara*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hal.41

pemikir yang lain seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah.<sup>28</sup>

Periode pertengahan dimulai 1250-1800 M. Pada periode ini terjadi kemunduran umat Islam dengan terbaginya dunia Islam menjadi dua bagian yaitu Arab dan Persia. Pada periode ini juga terbentuk tiga kerajaan besar, yaitu kerajaan Usmani di Turki, kerajaan Safawiyah di Persia dan kerajaan Mughal di India. Kemunduran Islam pada periode ini salah satunya diakibatkan adanya ekspansi Barat terhadap daerah-daerah Islam, yang kemudian merugikan umat Islam di seluruh dunia, karena Negara Islam telah dikuasai oleh Barat.<sup>29</sup>

Harun Nasution selanjutnya menyatakan bahwa periode ketiga, adalah modern yang dimulai tahun 1800 M dan seterusnya.<sup>30</sup> Harun tidak membatasi periode ini, namun yang jelas periode ini disertai dengan munculnya ide-ide pembaharuan dalam Islam. Berdasarkan periodisasi yang dikemukakan oleh Harun Nasution tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan politik Islam terbentuk menjadi tiga periode yaitu periode klasik tahun 650-1250 M, periode pertengahan 1250-1800 M, dan periode modern tahun 1800- sampai dengan sekarang.

#### 1. Periode Klasik

Pemikiran politik Islam mulai timbul setelah Rasulullah SAW wafat. Sebelum itu kepada para pemimpin diberikan bekal-bekal bagaimana menjalankan pemerintahan dalam Islam melalui kiprah politik dan amalan sepanjang hidup

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal.42

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 89

<sup>30</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, Cet XI, 1996, hal. 12-14

beliau. Maka tidak terlalu berlebihan jika cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah semasa hidupnya dapat dijadikan sebagai landasan dasar pembangunan politik umat Islam. Dengan wafatnya Rasulullah dunia Islam kehilangan kepemimpinan sehingga menimbulkan perdebatan dikalangan umat Islam dalam menentukan siapa yang tepat untuk memangku jabatan sebagai pengganti Rasulullah SAW.

Perdebatan pendapat yang terjadi dalam penentuan siapa yang akan menjadi khalifah ini berawal dari perdebatan pandangan antara masyarakat Madinah (Anshar) dengan masyarakat Makkah (Muhajirin) di Saqifah Bani Sa'idah. Dalam pertemuan itu kaum Anshor mengusulkan Sa'ad ibn Ubadah untuk menjadi khalifah umat Islam, sedangkan suku Aus menginginkan pemimpin mereka menjadi khalifah. Setelah kejadian itu diketahui oleh tokoh-tokoh Muhajirin seperti Abu Bakar dan Umar, mereka segera mendatangi Saqifah Bani Sa'idah untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Dalam menyelesaikan perselisihan itu Abu Bakar mengusulkan agar khalifah yang akan dipilih dari golongan Muhajirin. Karena mereka pertama sekali memeluk agama Islam dan mereka pun mempunyai hubungan dengan keluarga Nabi. Disamping itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa golongan Quraisy lebih berhak atas kepemimpinan umat dari pada golongan yang lain, sebagaimana dinyatakan dalam hadist yang artinya :: *...Kepemimpinan Itu adalah dari golongan Quraisy, sesungguhnya mereka itu berhak atas kamu (dari segi Jabatan kepemimpinan).* (H.R. Ahmad<sup>31</sup>)

---

<sup>31</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad ibn Hambal*, Juz III, Al-Maktabah Al-Islami, Bierut, Cet, II, 1398 H./ 1978 M, hal.129

Dalam situasi seperti itu muncul Hubab Ibn Munzir yang mengusulkan untuk dibentuk dua khalifah, yaitu seorang dari golongan Anshor dan seorang lagi dari golongan Muhajirin. Usul tersebut dibantah oleh Umar dengan alasan dua khalifah akan menimbulkan perpecahan dalam Negara. Sementara itu Abu Bakar juga menyatakan bahwa "Kami golongan Muhajirin adalah *umara* dan kamu golongan Ashor adalah *wuzara*."<sup>32</sup> Pernyataan Abu Bakar dapat menenangkan suasana ketika itu dan mereka membenarkan ucapannya. Lalu Umar pun membait'atkan Abu Bakar sebagai Khalifah menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin politik dan Negara Islam.<sup>33</sup>

Peristiwa ini memberikan suatu gambaran tentang kondisi masyarakat Islam pasca Rasulullah SAW. Meskipun tidak membentuk partai politik dalam pemilihan khalifah, namun mereka menonjolkan dan membela kaumnya untuk tampil sebagai pemimpin dengan alasan masing-masing.

Kebijakan yang dilakukan oleh para khalifah (Al-khulafa al-Rasyidin) setelah Rasulullah SAW wafat, dalam menjalankan roda pemerintahan Islam mereka masih tetap bergantung kepada isi piagam Madinah.<sup>34</sup> Ini tergambar dari pidato-pidato yang diucapkan oleh mereka setelah resmi dibait'at sebagai khalifah.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Muhammad Husein Haikal, *Sejarah hidup Muhammad*, (Terjemah, Ali Audan), Pustaka Lentera Antar Nusa, Jakarta, Cet, IXX, 1996, hal.580.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal.582-583

<sup>34</sup> J.Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyash, Sejarah dan Pemikiran*, Rajawali pers, Jakarta, Cet. I. 1994, hal. 8

<sup>35</sup> Adapun inti dari isi piagam madina yaitu, prinsip-prinsip orang-orang, Muslim dan Mukmin adalah umat yang satu (semua manusia adalah umat yang satu), prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan, prinsip tolong menolong, dan membela yang teraniyaya, prinsip hidup bertetangga, prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip pelaksanaan hukum dan sanksi hukum, prinsip kebebasan beragama dan hubungan antar pemeluk

Abu Bakar, menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah, menyampaikan pidatonya sebagai berikut :

“Wahai manusia ! saya telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal bukan orang yang terbaik diantara kamu. Maka jika aku menjalankan tugasku dengan baik, ikutilah aku. Tetapi jika aku berbuat salah, maka betulkan aku. Orang yang kamu pandang kuat, saya pandang lemah. Sedangkan orang yang kamu pandang lemah, saya pandang kuat, hingga saya dapat mengembalikan haknya kepadanya. Hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kamu tak perlu mantaatiku”<sup>36</sup>

Khalifah kedua Umar Ibn Khattab dalam pidatonya menyatakan : “Hai manusia, sesungguhnya aku telah menjadi pemimpin kamu, dan sekiranya bukan harapan kamu supaya aku menjadi orang terbaik bagimu dan orang terkuat diantara kamu, dan lebih mampu mengurus urusanmu, tentu aku tidak akan diangkat menjadi pemimpin”<sup>37</sup>. Selain itu Umar juga menyatakan : “Wahai manusia, apabila aku berlaku baik, maka bantulah aku dan jika aku bersalah, luruskanlah Aku”.<sup>38</sup>

Pidato Usman ibn Affan sebagai khalifah ketiga adalah : sesungguhnya tugas ini telah dipikul kepadaku dan aku telah menerimanya dan sesungguhnya aku adalah seorang *muttabi* (pengikut sunnah Rasul) dan bukan *mubtadi* (orang yang berbuat bid'ah)”.<sup>39</sup>

Dan akhirnya Ali ibn Thalib sebagai khalifah keempat menyampaikan pidatonya setelah dibai'at sebagai berikut : “sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab suci Al-qur'an sebagai petunjuk yang menerangkan padanya yang baik dan yang jahat, maka hendaklah kamu ambil yang baik dan tinggalkan yang jahat, kewajiban-kewajiban kamu tunaikan kepada Allah, Allah telah

---

agama, perinsip amar ma'ruf nahi mungkar, perinsip kepemimpinan, perinsip tanggung jawab peribadi dan kelompok, perinsip ketakwaan dan ketaatan.

<sup>36</sup> Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. (Terjemah, Mukhtar Yahya), Pustaka Al-Husna, Jakarta, Cet. IV. 1990. hal. 227

<sup>37</sup> Muhibbin, *Hadits-Hadist politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. I. 1996, hal. 43-46

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 44-45.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 47



23/LP/PD/02/12

mengharamkan apa yang haram, dan memuliakan kehormatan seseorang muslim berarti memuliakan keseluruhannya, dan muliakanlah keikhlasan dan tahud orang-orang muslim, hendaklah setiap orang muslim menyelamatkan manusia dengan kebenaran lisan dan tangannya".<sup>40</sup>

Pidato-pidato tersebut member gambaran bahwasannya pemikiran khulafah al-rasyidin dalam merealisasikan pemerintahan Islam berdasarkan kepada prinsip musyawarah, persamaan, kebebasan berpendapat, keadilan social dan kesejahteraan rakyat terhadap semua lapisan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Sistem pemilihan dimasa Khulafah al-Rasyidin tidak terdapat suatu pola yang baku. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah melalui pemilihan dalam musyawarah terbuka, sedangkan Umar ibn Khattab yang merupakan sebagai penggantinya ditentukan sendiri oleh Abu Bakar, karena kekhawatirannya akan timbul perpecahan di kalangan umat Islam seperti yang pernah terjadi pada waktu Rasulullah SAW wafat. Umar ibn Affan diangkat menjadi khalifah berdasarkan musyawarah dewan formatur yang terdiri dari enam orang yang ditunjuk oleh pendahulunya dan penunjukan tersebut tidak berdasarkan perwakilan unsure, tetapi berdasarkan atas pertimbangan kualitas pribadi masing-masing. Karena mereka tergolong *Al-Sabiq al-Awwalun* yaitu orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam.<sup>41</sup> Ali ibn Abi Thalib diangkat melalui pemilihan dan pertemuan terbuka, juga berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh Umar, tetapi pada saat itu suasana sedang kacau. Oleh karenanya pengangkatan Ali ditolak oleh sebahagian masyarakat, termasuk Mu'awiyah ibn Abu Sofyan, yang ketika itu

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal.48

<sup>41</sup> Munawir Sadzali, *op-cit*, hal.30-31

menjabat sebagai gubernur Suria. Keempat Khalifah diatas yang telah menjadi pemimpin untuk dunia Islam mengakhiri masa jabatannya karena wafat.

Pada masa penghujung pemerintahan Ali ibn Abi Thalib, timbul peperangan antara pendukung Ali dengan pendukung Mu'awiyah disuatu daerah yang bernama Shiffin. Ini dikarenakan Mu'awiyah beserta pendukungnya tidak setuju dengan pembai'atan Ali sebagai khalifah serta ambisi Mu'awiyah untuk menduduki jabatan khalifah. Peperangan tersebut melahirkan pemikiran politik baru dalam sejarah peradaban Islam, yaitu meunculnya *Syiah* (pendukung Ali), *Khawarij* (kelompok yang tidak setuju dengan keputusan Ali), dan pendukung Mu'awiyah yang akhirnya berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang pusatnya di Damaskus pada tahun 661-M.

Syiah adalah suatu kelompok pendukung Ali ibn Abi Thalib. Pemikiran politik yang dikembangkan oleh kelompok ini adalah Al-washiyah, yaitu Rasulullah SAW sebelum wafat pernah berwasiat kepada Ali ibn Abi Thalib bahwa ia akan dijadikan khalifah umat Islam.<sup>42</sup>

Pemikiran syiah tersebut membangkitkan semangat penganutnya untuk senantiasa menentang penguasa yang bukan dari keturunan Ali. Dalam pandangan mereka sebelum adanya suatu pemerintahan yang dipimpin oleh *Ahlu al-Bait* (keturunan Ali), maka perjuangan yang dilakukan oleh pendukung syiah tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu orang-orang Syiah selalu bersikap ekstrim kepada pemerintahan daulah Umayyah maupun Abbasyiah. Cita-cita kaum Syiah tersebut baru dapat tercapai setelah berhasil mendirikan daulah Fatimiyah di Mesir pada tahun 909-m.

---

<sup>42</sup> Umar Hasyim, *Apakah Anda Termasuk Golongan Sunnah Wal-Jama'ah?*, Bina Ilmu Surabaya, Cet. 1978, hal.30

Khawarij adalah golongan yang membelot dari golongan Ali ibn thalib, karena tidak menyetujui kebijakan yang ditempuh oleh Ali dalam menyelesaikan pertikaian dan peperangan dengan Mu'awiyah. Teori politik yang dikembangkan golongan ini, yaitu rakyat menentang dan memberontak terhadap pemerintahan yang berkuasa jika didapati tindakan dan sikap seorang pemimpin tidak sejalan dengan undang-undang pemerintahan (Al-qur'an). Golongan khawarij mengandalkan sepenuhnya kepada Al-qur'an, makanya penyimpangan sekecil apapun dari ajaran Al-qur'an yang dilakukan umat Islam dianggap sebagai menghina Tuhan dan patut dihukum dengan hukuman yang berat, baik yang melakukan kesalahan itu seorang pemimpin maupun rakyat biasa. Hal tersebut rujukan dari firman Allah :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*Artinya : ...Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang kafir. ... Barang siapa yang tidak memutuskan perkara, menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang yang zalim. ... Barang siapa yang tidak memutuskan perkara, menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Maidah : 44-47)*

Persoalan pertama dalam sistem politik Khawarij adalah pelaksanaan syariah dalam persolan khalifah. Menurut Khawarij, siapapun yang mampu melaksanakan syariah dan dianggap telah memenuhi syarat bisa dijadikan seorang pemimpin.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, (Terjemah, Mufid) Rineka Cipta, Jakarta, Cet. 1, hal.6

Mu'awiyah adalah pendiri kerajaan Bani Umayyah. Ia telah merubah sistem khalifah kepada sistem Monarki, yakni pemerintahan secara turun temurun, dan perubahan sistem syura serta bai'at kepada sistem otoriter dengan cara menggunakan kekuatan sewenang-wenang. Berubahnya sistem pemerintahan dari khalifah kepada kerajaan ini terlihat pada kekuasaan Umayyah dalam menjalankan pemerintahannya. Mu'awiyah ibn Abi Sofyan mengadakan perubahan sistem pemerintahan menurut ambisinya untuk menduduki jabatan sebagai khalifah dan mempertahankannya. Untuk itu ia telah melakukan tindakan kekerasan dengan menghalalkan segala cara.<sup>44</sup>

Sejak Mua'wiyah berkuasa timbul sistem dinasti dan tirani di dalam pemerintahan Islam. Sejak itulah pemerintahan sebagaimana pada Rasul dan masa Khulafa al-Rasyidin. Dinasti Umayyah dan Abbasyiah sekali pun masih memakai gelar khalifah terhadap raja-raja, namun makna khalifah dalam arti pengganti Rasul seperti yang berlaku dimasa Al-Khulafa al-Rasyidin telah berubah. Para khalifah yang hidup di masa ini lebih memilih hidup dalam sistem kekaisaran seperti Persia dan Romawi kuno. Mereka mendirikan istnana-istina kerajaan sebagai tempat tinggal raja dan keluarganya yang memiliki pengawal khusus, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh khalifah tersebut menjadikan putusya hubungan rakyat dengan pemimpin, sehingga sangat sukar bagi rakyat untuk bertemu secara langsung dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi tanpa melalui perantara. Keadaan yang demikian ini lama kelamaan mengakibatkan rakyat menjadi putus asa dan sengsara dibawah tirani penguasa yang zalim. Sistem pemerintahan yang demikian ini sangat berbeda dengancara yang pernah

---

<sup>44</sup> Abdul Aziz Thaba, *Op-cit*, hal. 107.

dilakukan oleh Al-Khulafa al-Rasyidin yang hidup di tengah-tengah rakyat sehingga memudahkan bagi setiap orang untuk bertemu dengan mereka dalam suasana yang benar-benar bebas dan aman.

Sistem pemerintahan dan kekuasaan yang bersifat nepotisme pada masa itu menyebabkan timbulnya kegiatan-kegiatan pemikiran yang menginginkan suatu kondisi masyarakat yang ideal menurut Islam. Para ahli hukum Islam (fuqaha) juga memberikan sumbangan besar terhadap pembentukan sistem politik Islam pada waktu itu.<sup>45</sup> Diantara tokoh-tokoh yang terkenal pada periode ini adalah Ibnu Abi Rabi, Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Al-Ghazali yang dikenal sebagai pengikut golongan Sunni.

Ibnu Abi Rabi adalah ilmuwan politik yang hidup pada masa khalifah Al-Mu'tasimin, yaitu khalifah yang kedelapan dari Daulah Abbasyiah. Menurut Ibnu Abi Rabi, Allah menciptakan manusia dengan watak yang cenderung untuk berkumpul dan bermasyarakat. Manusia tidak memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Apabila mereka hidup bersama dan tinggal di kota-kota, maka untuk menjamin kerukunan dan keserasian hubungan antara mereka. Tuhan telah meletakkan peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi. Bentuk pemerintahan yang ideal menurut Ibnu Abi Rabi adalah monarki, dibawah pimpinan seorang raja serta penguasa tunggal. Hal ini dikarenakan apabila terdapat banyak kepala Negara dikhawatirkan akan terjadi kekacauan serta sulit untuk membentuk suatu persatuan. Ibnu Abi Rabi juga menawarkan enam syarat yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin menjadi raja. Syarat-syarat tersebut ialah :

---

<sup>45</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Terjemah, Lentera Basri Tama), Jakarta, Cet, II, 1996, hal. XII-XIV.

1. Harus Anggota keluarga dan mempunyai hubungan nasab yang dekat dengan raja sebelumnya
2. Aspirasi yang luhur
3. Pandangan yang mantap dan kokoh
4. Ketahanan dalam menghadapi kesukaran
5. Kekayaan yang banyak
6. Pembantu-pembantunya setia<sup>46</sup>

Al-farabi yang hidup dalam situasi yang digoncang oleh berbagai gejolak pada masa pemerintahan Daulah Abbasyiah mempunyai persepsi yang sama dengan Ibnu Abi Rabi tentang kecenderungan manusia untuk hidup bermasyarakat. <sup>47</sup> Al-Farabi mengklasifikasikan masyarakat menjadi dua, yaitu masyarakat yang sempurna dan masyarakat yang tidak sempurna. Masyarakat yang sempurna terbagi lagi menjadi tiga yaitu masyarakat sempurna besar, masyarakat sempurna sedang, dan masyarakat sempurna kecil. Masyarakat sempurna besar adalah gabungan yang sepakat dan saling membantu kerjasama. Masyarakat sempurna sedang adalah masyarakat yang terdiri dari satu bangsa yang memenuhi satu wilayah, sedangkan masyarakat sempurna kecil adalah masyarakat yang terdiri dari penghuni suatu kota. Adapun masyarakat yang tidak sempurna adalah kehidupan social tingkat desa, kampung, lorong dan keluarga yang tidak memenuhi warganya. Selanjutnya Al-Farabi menyatakan masyarakat

---

<sup>46</sup> Munawir Sadzali, *Op-cit*, hal.48

<sup>47</sup> *Ibid*, hal.50. Lihat Juga Muhammad Azhar, *Filsafat politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Rajawali Pers, Jakarta, Cet. I 1996, hal. 76.

sempurna kecil atau disebut dengan Negara kota merupakan kesatuan politik yang terbaik.<sup>48</sup>

Al-Mawardi terkenal sebagai ilmuwan politik pada masa ini juga, menyatakan bahwa tumbuhnya Negara itu sama seperti pendapat kedua tokoh yang telah disebut diatas. Selanjutnya Al-Mawardi menyatakan khalifah atau kepala Negara adalah pemimpin agama dan pemimpin politik. Seorang kepala Negara boleh digeser dari jabatannya jika menyimpang dari suatu keadilan.<sup>49</sup>

Gagasan politik Al-Ghazali ialah, keberadaan manusia dimuka bumi ini perlu kepada pengalaman dan penghayatan ajaran agama dengan benar.<sup>50</sup> Lebih lanjut ia menyatakan bahwa dunia ini adalah lading untuk mengumpulkan perbendaharaan untuk kehidupan akhirat. Dunia ini juga merupakan wahana untuk mencari ridha Tuhan bagi mereka yang menganggapnya sebagai wahana serta jembatan, dan bukan tempat tinggal tetap dan akhir. Untuk diperlukan seorang pemimpin yang menerapkan syariat dengan benar untuk mengelolah suatu sistem pemerintahan dalam suatu Negara.<sup>51</sup>

Dalam melihat gagasan politik Ibnu Abi Rabi, Al-Mawardi dan Al-Ghazali, Munawir Sadzali menyatakan bahwa mereka itu hanya menerima sistem kekuasaan yang ada pada masa itu dan dalam penyajian gagasannya juga bertitik tolak pada pemberian legitimasi kepada sistem pemerintahan yang ada atau

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 58

<sup>49</sup> Munawir Sadzali, *Op-cit*, hal.65

<sup>50</sup> Al-Gazhali, *Mutiara Ihya lulumudln*, (terjemah, Irwan Kuniawan), Mizan bandung, Cet, I, 1997, hal.9

<sup>51</sup> Munawir Sadzali, *Op-cit*, hal.76

mempertahankan status quo. Sedangkan pemikiran politik pada waktu itu hampir seluruhnya dipengaruhi alam pikiran Yunani terutama Plato.<sup>52</sup>

Sebagai kesimpulan perkembangan politik pada periode klasik adalah bercorak theology atau pemikiran politik bersifat ketuhanan dengan menonjolkan kebahagiaan universal dan idealism syariat Islam.

Lebih dari itu, fungsi etis yang lebih luas dari Negara dalam teori-teorii Yunani dan Islam tidak selalu seragam, bahkan masing-masing berbeda. Standar-standar etika "keadilan" Plato dan 'kehidupan' baik Aristoteles memang agak mirip dengan standar keagamaan Ibnu Taimiyah. Namun standar ayang diajukan Ibnu taimiyah tidak ditentukan oleh akal manusia, tetapi ditentukan oleh wahyu Allah, Sedangkan Fokusnya bukan kehidupan sekarang, tetapi kehidupan yang akan datang (akhirat).

Kedua teori ini sama-sama menggunakan perspektif organic serupa. Bila dikaitkan dengan masalah individu, maka masing-masing tetap terkait untuk menandainya dengan sebuah peranan yang segaris dengan sistem etikanya sendiri-sendiri. Masyarakat Yunani mangharapkan indivisu untuk menunjukkan fungsinya, yakni melakukan yang terbaik dan memberikan sumbangsih bagi "kesempurnaan manusia", sedangkan Islam menuntut individu untuk memenuhi "kewajiban-keawajibannya" kepada Allah dan sesame Muslim dalam hubungan dengan kepentingan umat.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal 76

<sup>53</sup> Khalid Ibrahim Jindan , *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan Islam* (terjemah, Masrohin), Risalah Gusti, Surabaya, 1995, hal. 44.

## 2. Periode Pertengahan

Periode pertengahan merupakan masa titik awal kemunduran politik peradaban Islam. Hal ini dikarenakan berakhirnya kekhalifahan Abbasyiah yang menjadi lambing persatuan umat Islam pada masa itu. Kondisi umat Islam pada saat itu terpecah menjadi Negara-negara atau kerajaan-kerajaan kecil yang bebas dan merdeka. Tiga kerajaan besar yang terkenal pada masa itu adalah Turki Usmani, Safawiyah, dan Mughol, yang ketiga-tiganya mengambil bentuk monarki dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Sementara itu di beberapa daerah muncul Negara-negara yang merdeka dan berdiri sendiri, mereka memakai gelar sulthan untuk kepala negaranya.<sup>54</sup>

Diantara politikus muslim yang terkenal pada masa ini adalah Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah yang cenderung kepada pemikiran politik Sunni.<sup>55</sup> Pemikiran politik Ibnu Taimiyah berpijak kepada ketentuan Al-qur'an. Dia menyakini bahwa Al-qur'an mencakup semua permasalahan yang harus diikuti baik yang berhubungan dengan tauhid, akhlak, kehidupan manusia dan lain-lain. Selanjutnya ia menyatakan aliran Salaf tidak memakai dalil-dalil logika yang rasional dalam mempertahankan keyakinan agamanya, karena menurut mereka dalil-dalil tersebut mulai dikenal ketika masa sahabat.<sup>56</sup>

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa, menegakkan Negara merupakan kewajiban dan tugas yang dibebankan oleh Allah kepada manusia untuk menjadi khalifah dimuka bumi ini. Mungkin istilah Negara tidak disinggung dalam Al-

---

<sup>54</sup> Muhibbin, *Op-cit*, hal.52

<sup>55</sup> Munawir Sadzali, *Op-cit*, hal.90

<sup>56</sup> Ibnu Taimiyah, *Jalan lurus Menuju Sorga*, (Terjemah, Halimuddin), Rineka Cipta, Jakarta, Cet, I, hal. 37-103

Qur'an dan hadits, akan tetapi unsur-unsur yang esensial yang merupakan dasar Negara dapat kita temukan dalam keduanya.<sup>57</sup> Ibnu Taimiyah merupakan pendukung aliran Salaf, ia menyatakan aliran salaf mengambil sumber keyakinan dari nash Al-qur'an dan hadits yang menjadi sumber keimanan dan katauhidan, bukan logika. Jika menggunakan logika dalam pandangan Ibnu Taimiyah termasuk bid'ah dan sesat. Penggunaan rasio semacam ini tidak pernah dikenal dan dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in. Sistem pemikiran Ibnu Taimiyah meletakkan akal pikiran dibelakang nash agama dikarenakan kemampuan akal sangat terbatas.

Pemikiran politik Ibnu Taimiyah sejalan dengan pemikiran politik pada masa klasik seperti Ibnu Abi Rabi, Al-Mawardi, dan Al-Ghazali, yang mengatakan tujuan pembentukan suatu Negara yang secara eksplisit dan implisit adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup duniawi dan ukhrawi umat manusia.<sup>58</sup> Ibnu Taimiyah menyatakan, hanya manusia yang berpolitik dapat menentukan kehidupan dalam masyarakat, serta memerlukan dukungan kepada persatuan dan solidaritas yang kuat dalam mendirikan suatu Negara. Keberadaan seorang pemimpin dalam mengurus sebuah Negara adalah penting. Jika tidak masyarakat akan kacau. Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kebutuhan manusia akan negara didasarkan pada akal dan Sunnah Rasulullah SAW. Argumen rasionalnya terletak pada kebutuhan universal sesama manusia untuk bergabung,

---

<sup>57</sup> Muhammad Azhar, *Filsafat politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hal. 95

<sup>58</sup> Munawir Sadzali, *Op-cit*, hal.95

bekerjasama dan menikmati berbagi manfaat kepemimpinan tanpa peduli apakah mereka menganut suatu agama atau tidak.<sup>59</sup>

Sebagai ihtisar, perkembangan pemikiran politik periode pertengahan tidak jauh berbeda dengan pemikiran politik periode klasik, pemikiran politik pada periode ini didominasi oleh golongan kaum Sunni, dan teori yang mereka kembangkan adalah menghubungkan kebijakan pemerintah dengan syariat Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem politik yang dikembangkan pada periode pertengahan sedikit kaku jika dibandingkan pada masa sebelumnya, karena situasi dan pemahaman agama mempengaruhi pemikiran politik Islam pada periode pertengahan ini.

### 3. Periode Modern

Pemikiran politik yang diselenggarakan dalam periode modern adalah pada wal abad IX M, yaitu bersamaan dengan kebangkitan Islam dalam menghadapi kolonialisme. Adapun faktor yang melatarbelakangi pemikiran politik Islam modern adalah munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dan pemurnian ajaran Islam,<sup>60</sup> akibat dari kemerosotan spiritual umat.

Di jazirah Arab umpamanya muncul gerakan pemurnian yang dipelopori oleh Muhammad ibn Abdul Wahab,<sup>61</sup> di India oleh Syah Waliyullah, di Sudan oleh Muhammad Ahmad atau dikenal juga sebagai Al-Mahdi,<sup>62</sup> serta beberapa tokoh dari daerah lain.

---

<sup>59</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Op-cit*, hal.46

<sup>60</sup> M.Ridwan Lubis dan Muhammad Syahminan, *Prospek Pembaharuan Pemikiran Islam*, Pustaka Widayasarana, Medan, Cet, I, 1994, hal.5

<sup>61</sup> Hatun Nasution, *Op-cit*, hal. 74-75

<sup>62</sup> Abdul Rahman bin Haji Abdullah, *Pemikiran Islam Masa kini, sejarah dan Aliran*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1987, hal. 173-174

Penjajahan dunia Barat terhadap dunia Islam juga merupakan faktor timbulnya pemikiran politik Islam pada periode modern. Penjajahan telah membakar semangat umat Islam untuk melakukan perlawanan.<sup>63</sup> Justru itu pemikiran politik pada periode ini berorientasi pada pembaharuan dan pemurnian ajaran Islam, karena perlawanan terhadap penjajahan tersebut bukan hanya berbentuk fisik, tetapi juga perlawanan mental dan spiritual. Dalam hal ini terdapat tiga golongan dalam mewarnai pemikiran politik Islam. Pertama golongan yang menyatakan bahwa antara agama Islam dan politik tidak bisa dipisahkan. Islam adalah suatu agama yang ajarannya lengkap dan bersifat universal. Justru itu mereka beranggapan bahwa pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan al-Khulafa al-rasyidin merupakan suatu contoh yang ideal. Golongan ini juga menyatakan ajaran Islam dapat dijalankan sepenuhnya jika dibentuk sebuah Negara Islam. Oleh karena itu kelompok ini berjuang dengan mendirikan organisasi-organisasi yang berbau politik agar mewujudkan sebuah pemerintahan yang berdasarkan ajaran Islam. Di antara tokoh-tokoh aliran ini adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Sayyid Quthub, Hasan Al-Bana, dan Al-Maudi. *...*

Kedua, golongan yang memisahkan agama dengan urusan pemerintahan, golongan ini beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang yang ditugaskan untuk mengajak manusia kembali kepada hidup yang mulia dan bukan mengajak umat untuk mendirikan kerajaan seperti kondisi para Rasul sebelumnya. *...*

---

<sup>63</sup> Munawir Sadzali, *Op-cit*, hal. 111-114

Tokoh yang terkenal dari golongan ini adalah Ali-Abdu al-Raziq, dan Thaha Husein.<sup>64</sup>

Ketiga, golongan beranggapan bahwa ajaran Islam itu tidak menentukan suatu sistem dan bentuk pemerintahan. Namun ajaran Islam telah meletakkan prinsip-prinsip dasar peradaban manusia yang berkembang sepanjang zaman. Golongan ini juga mengakui bahwa ajaran Islam itu bukan hanya membicarakan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga membicarakan hubungan manusia dengan manusia. Tokoh yang menonjol dari golongan ini adalah Muhammad Husein haikal.<sup>65</sup>

Atas dasar pernyataan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pemikiran politik Islam menjadi suatu perdebatan. Munculnya perdebatan tersebut karena adanya perbedaan dalam memandang teks Al-qur'an dan Sunnah Nabi. Dalam menafsirkan tersebut tentunya dipengaruhi oleh faktor waktu dan lingkungan yang bersifat teologis, historis dan sosiologis. Pertimbangan teologis merujuk pada watak universalisme Islam yang sangat luas. Pertimbangan historis mengacu pada apa yang pernah dipraktekkan dalam realitas historis umat Islam. Sedangkan pertimbangan sosiologis berhubungan dengan kenyataan kuantitatif bahwa pada sebagian wilayah kenegaraan umat Islam menempatkan dirinya sebagai mayoritas.

Maka berdasarkan hal di atas dalam menafsirkan masalah hubungan antara Islam dan politik terdapat pandangan yang berbeda, yaitu antara pendekatan *Formalistik* dan *Subtansialistik*. Pendekatan formalistic cenderung mementingkan

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hal. 139

<sup>65</sup> *Ibid*, hal. 179

bentuk daripada isi, sedangkan penekatan substansialistik cenderung mendekati isi daripada bentuk.<sup>66</sup> Dalam suatu kerangka teoritis terjadi suatu perdebatan antara Islam formalistic dan Islam Subtansialistik dalam mencari suatu bentuk sistem pemerintahan yang ideal dalam pandangan Islam.

### C. Komunikasi Politik

Komunikasi Politik merupakan suatu kajian ilmu pengetahuan yang dibangun dari berbagai disiplin ilmu, terutama komunikasi dan politik. Antara komunikasi dan politi memiliki hubungan yang sangat erat saling mendukung satu dengan yang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa, kehidupan politik tentunya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan komunioutput dialirkan kemabalikasi karena pada dasarnya proses politik dapat diekspresikan dalam proses politik.<sup>67</sup>

Michael Rush dan Philip Althoff memberikan rumusan Komunikasi Politik sebagai suatu proses dimana informasi partai politik yang relevan diteruskan dari suatu bagian sistem poltik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Hal ini menunjukan bahwa Komunikasi Politik dapat diibaratkan sebagai layaknya darah yang mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan dan dukungan (aspirasi dan kepentingan masyarakat) kejantung (pusat) pemrosesan sistem politik. Dan hasil pemrosesan tersebut yang tersimpul dalam fungsi-fungsi output dialirkan kembali menjadi umpna balik ke

---

<sup>66</sup> Pendekatan Substansialistik tidak akan mempersoalkan bagaimana bentuk atau format dari suatu Negara, tetapi memusatkan perhatian kepada bagaimana mengisinya dengan sistem yang penuh etika dan moralitas agama. Pendekatan formalistic, mementingkan kepada bentuk-bentuk seperti terwujudnya suatu sistem politik Islam, munculnya paratai Islam, dan ekspresi simbolis politik Islam. Sehubungan dengan itu maka mereka sangat menekankan idiologisasi dan politisasi simbolisme keagamaan secara formal

<sup>67</sup>. Hafied Canggara, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 16.

sistem politik. Beitulah, komunikasi politik menjadi sistem politik hidup dan tumbuh secara dinamis.<sup>68</sup>

Komunikasi Politik jika dikaitkan dengan partai politik memiliki pengertian, yaitu : segala kegiatan menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa “Penggabungan kepentingan” (*interest aggregation*) dan “Perumusan kepentingan” untuk diperjuangkan menjadi *public policy*<sup>69</sup>

Kajian tentang komunikasi politik menunjukkan pesan politik sebagai objek formalnya. Sehingga titik berat konsep komunikasi politik terletak pada komunikasi dan bukan pada politik. Komunikasi politik difahami sebagai proses pemindahan (*transfer*) atau pertukaran (*exchange*) informasi atau pesan<sup>70</sup>. Pemahaman ini menjelaskan bahwa komunikasi politik merupakan penyampaian pesan-pesan tentang politik kepada audience

Merujuk kembali kepada kajian komunikasi politik, bahwa dalam suatu negara demokratis, memandang bahwa salah satu komponen penting dalam komunikasi politik adalah institusi politik dengan aspek komunikasinya, institusi politik alam hal ini diartikan sebagai lembaga atau organisasi yang bersifat politik, yaitu partai politik, dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukannya baik kedalam partai maupun di luar partai yang memiliki keterkaitan dengan institusi kenegaraan.

---

<sup>68</sup> . Etin Nurhaetin Ningrum, *Dinamika Suara Partai & Strategi Pemenangan Pemilu*, Kencana Mas Publishing ouse, Jakarta, 2005, hlm. 21

<sup>69</sup> . Meriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 405

<sup>70</sup> . Don F-R Wayne Pace Faules, *Komunikasi Organisasi; Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, Rosda Karya, Bandung, 2006, hlm. 28

Partai politik merupakan organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut simpati rakyat dalam bentuk dukungan dengan melalui persingan baik satu golongan maupun berbagai golongan yang memiliki sudut pandang ideologi politik yang berbeda.

### C. Bentuk-bentuk komunikasi politik

Komunikasi politik merupakan kegiatan persuasi, dan hampir tidak ada kegiatan komunikasi yang tidak mempengaruhi orang lain, dalam hal ini yang dipengaruhi adalah khalayak maupu pemilih yang memiliki tujuan untuk mengubah atau mempertahankan persepsi, persepsi, perasaan, pikiran, maupun pengharapan agar mereka tetap bersikap dan berperilaku sesuai dengan keinginan komunikator politik.

Beberapa bentuk komunikasi politik yang sudah lama dikenal dan diterapkan dikalangan politisi, para kandidat dan partai politik dalam dunia politik adalah retorika dan agitasi politik, propaganda politik, public relation politik, , periklanan politik, dan sebagainya. Semua bentuk komunikasi politik yang dilakukan tersebut sebagai kegiatan untuk mencapai kegiatan tujuan politik, yaitu kekuasaan, kepentingan untuk menciptakan situasi konflik.

#### 1. Rethorika dan Agitasi Politik

Rethorika atau dalam nahasa Inggris *rethoric* berasal dari kata latin *rteorica* yang berarti ilmu bicara. Arisoteles menyebutkan rethorika sebagai seni perusasi yaitu uraian yang singkat, jelas dan meyakinkan dengan menggunakan keindahan bahasa dalam penyampainnya. Dalam pengertian yang lebih luas rethorika diartikan sebaagi seni mempergunakan bahasa secara efektif. Aristoteles menegaskan bahwa rethorika dipergunakan untuk membenarkan (*currective*), memerintah

(*instructive*), mendorong (*suggestive*), dan mempertahankan (*defensive*) sesuatu yang didasarkan pada kebaikan masyarakat secara luas.<sup>71</sup>

Untuk dapat melakukan retorika yang persuasif dan mencapai tujuan rethorika dimaksud, harus didasarkan dan dioerhatikan faktor *ethos*, *pathos* dan *logos*. *Ethos* merupakan faktor kredibilitas seorang komunikator, ini menunjukkan bahwa rethorika akan berhasil apabila disampaikan oleh komunikator yang dipercayai oleh masyarakat (komunikan), *pathos* kemampuan dalam memilih dan menggunakan bahasa atau kata-kata yang baik, menarik dan simpatik untu mempengaruhi emosi khalayak pendengar, dan *logos* adalah seorang komunikator yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang apa yang disampaikannya dalam berpidat dan berbicara di depan publik.<sup>72</sup>

Dengan demikian rethorika politik dapat dipahami sebagai sebuah seni dengan menggunakan bahasa untuk mempengaruhi orang lain dengan tujuan-tujuan politik. Rethorika politik juga sering disebut sebagai suatu proses negosiasi. Selanjutnya menurut Aristoteles ada tiga maca rethorika politik, *delebrative rethoric*, *forensic rethoric*, dan *demonstrative rethoric*.<sup>73</sup>

*Delebrative rethoric*, yaitu sebuah komunikasi yang dirancang untuk menggoyang orang yang ada kaitannya dengan *public policy* dengan cara menggambarkan keuntungan dan kerugian relatif dan alan alternatif yang ditempuh. Fokusnya diletakkan kepada apa yang akan terjadi dikemudian hari

---

<sup>71</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 4.

<sup>72</sup> Ibnu Hamad, *Komunikasi Sebagai Wacana*, La Tofi Enterprise, Jakarta, 2010, hlm. 81

<sup>73</sup> .Dan Nimmo, *Political Communication and Public Opinion in america*, Goodyear Publication, Santa Monica, 1978, hlm. 116-117.

akan sesuatu kebijakan yang akan diambil. *Forensic rethoric*, yaitu komunikasi yang memiliki sifat ke fungsi *judicial*. Tuuannya aalah untuk menunjukan suatu kekeliruan atau kebenaran, tanggung jawab, hukuman atau ganjaran yang tela dibuat masa lalu. *Demonstrative rethoric*, yaitu komunikasi yang menggambarkan tentang kebikan atau keburukan orang lain, organisasi, ide, dan sebagainya.

## 2. Propaganda politik

Propaganda merupakan suatu kegiatan komunikasi yang erta kaitannya dengan persuasi. SeHINGA Scott M.Ccutlip dan H.Center menyebut persuasi sebagai upaya menyampaikan informasi lewat cara tertentu yang membuat orang menghapus gambaran lama dalam benaknya aau memori pikirannya dan menggantikan dengan gambaran baru sehingga berubalah prilakunya. Hal terebut menunjukkan bahwa persuasi merupakan kegiatan mengrekonstruksi pesan dan membangun citra diri dalam pikiran orang lain dengan tujuan mempengaruhi orang terebut. Mempengaruhi orang lain berarti seuah upaya mengubah sikap orang tersebut terhadap diri kita atau terhadap suatu objek<sup>74</sup>

Harrold D. Lasswell menyampaikan pengertian propaganda secara lebih luas yaitu ; tehnik mempengaruhi tindakan manusia dengan memanipulasi refresentasi (penyajian) yang berbentuk lisan, tulisan, gambar atau musik. Lebih lanjut Laswell menyebutkan empat tujuan propaganda yaitu pertama, menumuhkan kebencian terhadap musuh, kedua, melestarikan persahabatan dengan sekutu, ketiga, mempertahankan persahabatan dan jia, mungkin, untuk

---

<sup>74</sup> . Dedy Djamaludin Malik &Yosal Iriantana, *Komunikasi Persuasif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, hlm. 23

menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang netral, keempat, menghancurkan semangat musuh.<sup>75</sup>

### 3. Public Relation Politik

Asosiasi-asosiasi humas seluruh dunia mengungkapkan defenisi public relation di Mexico City pada Agustus 1978 dan masih menjadi rujukan sampai hari ini, menyebutkan bahwa PR adalah suatu seni sekaligus disiplin ilmu sosial yang menganalisis berbagai kecenderungan, memprediksi setiap kemungkinan maupun konsekuensi dari setiap kegiatannya, memberikan masukan dan saran-saran kepada para pemimpin organisasi, dan mengimplementasikan program-program tindakan terencana untuk melayani kebutuhan organisasi serta kepentingan khalayaknya.<sup>76</sup>

Public relation dalam dunia kampanye politik biasanya disebut konsultan kampanye yang bertugas membangun image (citra) politik terhadap partai politik maupun kandidat, sedangkan dilain pihak membangun kesan negatif kepada para pesaingnya. PR di dunia politik juga memainkan peranan *spin doctor* sebagai stage manager yang mampu mengatur jalannya kampanye, seperti ; memberi naskah pidato, membuat agenda dan daftar pernyataan (statemen) politik yang akan disampaikan kandidat ketika berkampanye.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup>. James W.Jr, Tankarad, Severin J wenner, *Teori Komunikasi Sejarah, Metode dan Terapan Di Dalam Media Massa*, Kencana Perdana Media Gorup, Jakarta, 2007, hlm. 128

<sup>76</sup>. Lingkar Anggoro, *Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 45

<sup>77</sup>. Hafied Cangara, *Komunikasi Politik*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 285-286.

#### 4. Periklanan Politik

Periklanan politik merupakan usaha untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada khalayak dengan mengetengahkan berbagai pertimbangan dan alasan kuat perlunya masyarakat mendukung keberadaan partai politik maupun kandidat yang akan dipilih dalam kegiatan pemilihan umum. Pesan-pesan tersebut disampaikan dan disebarluaskan melalui media massa baik cetak maupun elektronik, seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, medi iklan, internet dan lainnya.<sup>78</sup>

Periklanan politik dalam hal ini berbeda dengan propaganda politik, perbedaan keduanya terleta pada khalayak tujuan. Propaganda ditujukan kepada orang-orang sebagai anggota kelompok (organisasi). Sedangakn periklanan lebih kepada orang-orang yang bebas yang tidak memiliki hubungan emosional secara politik

Periklanan politik dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, tidak terbatas pada priode kampanye saja, akan tetapi yang terpenting dapat membangun citra positif dalam sistem pemerintahan baik secara perseorangan ataupun organisasi.

---

<sup>78</sup>. Nanik Ismaini, *Periklanan Partai Politik, Menterjemahkan Pesan Rasional Dengan Eksekusi yang Relevan dan Emosional*, Dalam Prof.Dr. Harsono Suwardi, et, *Politik, Demokrasi & Manajemen Komunikasi*, Galang, Press, Bandung, 2002, hlm. 210-211

## BAB TIGA

### PERAN KOMUNIKASI POLITIK UMAT ISLAM DI INDONESIA

#### A. Pandangan Pemikir Islam Tentang Komunikasi Politik Islam

##### 1. Masa pemerintahan Orde Baru

Pada masa Orde Baru, sering disebut sebagai periode mencari alternatif-alternatif baru dalam memainkan peran politik Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alternatif-alternatif tersebut ada yang mengambil model pendekatan kultural,<sup>79</sup> ada pula yang mengambil pendekatan struktural.<sup>80</sup> Model pendekatan kultural, menginginkan terwujudnya yang "Islami" sedangkan pendekatan structural menghendaki terbentuknya sistem politik yang Islami.

Pada periode ini, upaya-upaya untuk membentuk Negara Islam (Islamic State) sudah banyak ditinggalkan oleh kalangan tokoh dan intelektual Muslim Indonesia. Hal ini terjadi karena kondisi sosial politik bangsa Indonesia telah banyak mengalami perubahan. Perubahan itu terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, dan yang paling mendasar adalah perubahan tampuk kepemimpinan

---

<sup>79</sup> Pendekatan cultural adalah penyadaran melalui symposium, pendidikan, seminar, penrtbitan media dakwah, perjuangannya bersifat individual. Agama menjadi *moral force* atau *inspirational* (moral, etika, intelektual). Artinya agama tidak member pemaksaan, semuanya harus datang dari dalam diri individu. Dalam hal ini agama menjadi petunjuk perilaku politik bisnis. Tujuannya meroba cara berfikir sesuai dengan ajaran agama. Lihat Bachtiar Efendy, *Islam dan Negara, Transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1998, hal.273-306.

<sup>80</sup> Pendekatan structural disebut juga strategi politik, karena menggunakan sarana politik. Cara yang ditempuh oleh strategi ini adalah berusaha mempengaruhi legislasi dan pelaksanaannya dengan duduk di DPR/MPR, atau mempengaruhi pengawasan legislative melalui birokrasi. Dalam strategi ini agama dapat menjadi simbol untuk melakukan perjuangannya, seperti yang dilakukan umat Islam melalui partai Masyumi dan NU. *Ibid.*

dari orde Lama ke Orde Baru, yang berakibat pada pergeseran orientasi, dari orientasi politik ke orerientasi ekonomi. Perbaikan ekonomi ini dalam pandangan Kamal Hasan, merupakan sesuatu yang mendesak bagi Orde Baru,<sup>81</sup> sebagai akibat daripada berbagai krisis ekonomi dan kecenderungan dari inflasi tinggi warisan politik "Orde Lama".<sup>82</sup>

Kehancuran "Islam Politik" (depolitisasi) pada masa Orde Baru telah melahirkan orientasi lain bagi Umat Islam, yang diantaranya dilakukan melalui gerakan pemurnian ajaran Islam, guna mencari pijakan baru untuk memainkan peran komunikasi politik Islam dan membangun Umat Islam kontemporer. Orientasi itulah yang pada gilirannya berhasil membangun peran komunikasi politik Islam melalui pendekatan struktural.<sup>83</sup> Dalam hal ini umat Islam banyak memasuki keseluruhan segmen kehidupan politik Indonesia, misalnya melalui Golkar yang merupakan partai politik terbesar pada masa Orde Baru.

Secara tidak langsung dalam kajian komunikasi politik umat Islam pada waktu itu melakukan bentuk komunikasi politik melalui pendekatan propaganda politik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh umat Islam, propaganda yang mereka lakukan kepada pemerintah melalui perubahan prilaku politik yang lebih melunak di bandingkan pada masa Orde Lama.

---

<sup>81</sup> Muhammad Hasan Kamal, *Modernisasi Indonesia Respon Cendkiawan Muslim*, (Terjemahan, Ahmadie Thaha), Lingkaran Studi Indonesia, Jakarta, 1987, hal.7

<sup>82</sup> *Ibid*, hal.8

<sup>83</sup> Abdul Azis dkk, *Gerakan Kontemporer di Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1991, hal. 10

Sebagai respon dari anggapan dan keadaan yang selalu menyulitkan keberadaan umat Islam telah mendorong tokoh-tokoh intelektual Islam Indonesia (tokoh-tokoh pembaharu), memberikan pemikiran dan pandangannya mengenai peran komunikasi politik Islam pada masa Orde Baru. Tokoh-tokoh pembaharu itu diantaranya Ahmad Syafi'I Ma'arif, Fachry Ali, Dawam Raharjo, Deliar Noor, Nurkholis Madjid, A.M. Saifuddin. Akan tetapi dalam skripsi ini penulis akan menguraikan pokok-pokok pikiran beberapa orang saja, yang penulis anggap berperan aktif dalam memberikan pemikiran dan perbandingannya mengenai komunikasi politik Islam pada masa Orde Baru, diantaranya :

### 1.1 Ahmad Syafi'I Ma'arif

Ahmad Syafi'I Ma'arif lahir di Sumpur Kudus Sumatera Barat, pada tanggal 31 Mei 1935. Kehidupannya pada masa muda berada dalam tradisi lingkungan modernis dan aktif dipergerakan Muhammadiyah, sering menulis tentang keagamaan, sejarah, social dan politik diberbagai media massa. Ia salah seorang yang mengembangkan pemikiran "Neo Modernis",<sup>84</sup> tampaknya pemikiran seperti ini dipengaruhi oleh Fazlurrahman ketika ia belajar di University Chicago USA, ia mendapat gelar MA dalam ilmu sejarah di Ohio University dan mendapat gelar Doktor di University Chicago.

Menurut Syafi'i, orientasi yang dicita-citakan Islam adalah membawa umat Islam menjadi umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia (Q.S.3:10), sehingga dapat bermanfaat dan menjadi teladan bagi kehidupan. Kehilangan sikap

---

<sup>84</sup> Pemikiran Neo Modernis adalah suatu pemikiran yang positif antara ajaran-ajaran Al-qur'an dalam pandangan hidup modern yang menghasilkan integrasi pranata-pranata modern dengan orientasi moral social Al-qur'an.

teladan dalam pentas kehidupan politik, umat Islam setelah berakhirnya periode Nabi dan Khulafaur-Rasyidin, disebabkan tingkah laku lama para penguasa Muslim pada waktu itu sudah tidak selaras lagi dengan konsep-konsep yang terdapat dalam Al-qur'an.<sup>85</sup> Syafi'I berpendapat bahwa Islam menginginkan wawasan kekuasaan yang merupakan cermin dari moral sebagai salah satu indicator dalam konteks dan realitas sejarah. Islam bukanlah semata-mata cita-cita moral dan doktrin-doktrin keagamaan saja, tetapi Islam membutuhkan wadah sejarah untuk mewujudkan cita-cita moralnya dari semua dimensi kehidupan.<sup>86</sup>

Sementara itu di lapangan teori politik, ia mengkritik doktrin-doktrin yang dilontarkan oleh para pemikir Islam seperti Al-Wardy yang tidak bersifat qur'ani. Ia menginginkan adanya keselarasan cita-cita politik dengan ketentuan yang telah digariskan oleh al-qur'an, khususnya dalam pelaksanaan hubungan antara islam dan konsep kenegaraan serta prinsip syuro dalam kaitannya dengan demokrasi Al-qur'an tidak menginginkan umat Islam harus selalu mengikuti teori-teori kenegaraan.

Mengenai pelaksanaan demokrasi, khususnya pada masa Orde Baru di Indonesia, ia menyatakan, demokrasi Pancasila yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru, secara teoritis setidaknya adalah demokrasi yang dibimbing oleh nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. Sebagai suatu sistem politik

---

<sup>85</sup> M. Syafi'I Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1995, hal.179-180

<sup>86</sup> A. Syafi'I Ma'arif, *Islam dan politik*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal.181

demokratik, seharusnya pancasila lebih longgar jika dibandingkan dengan demokrasi terpimpin.<sup>87</sup>

Walaupun pelaksanaannya sangat sulit diterapkan dengan semestinya, karena pemegang kekuasaan masih dimonopoli oleh meliter (elit meliter), sebagai salah satu indikasi bahwa prinsip keterbukaan masih belum menganggap kekuatan Islam sebagai suatu hal yang sangat ditakuti, dengan simbol ekstrem kanan yang senantiasa dapat menghambat kesetabilan nasional. Dalam hal ini, pemerintah masih sulit berlapang dada dalam menerima gejolak-gejolak politik yang terjadi.

Pelaksanaan demokrasi Pancasila seharusnya bersih dari tekanan dan ancaman penguasa, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Peran komunikasi politik Islam pada Orde Baru telah ditekan baik peranannya secara individu maupun kelompok. Sebetulnya menurut Syafi'i hal yang penting dalam demokrasi Pancasila adalah prakteknya, bukan hanya sekedar teori-teori demokrasi yang dipaksakan oleh penguasa melalui proyek P4 (pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Dalam hal ini, demokrasi Pancasila akan terwujud melalui adanya keterbukaan dan kemurnian pola pelaksanaan tanpa ada penekanan dan tindakan ketidakadilan dari pemerintah, sehingga perubahan sikap proposional dan professional dalam suatu sistem pemerintah maupun kembali menciptakan hubungan harmonis antara pihak pemerintah dengan pihak umat Islam.<sup>88</sup>

Dengan memperbanyak intensitas komunikasi politik yang dilakukan umat Islam kepada pemerintah, intensitas yang dilakukan lebih kepada merekonstruksi

---

<sup>87</sup> A. Syafi'i Ma'arif, Kata Pengantar Dalam M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1983, Hal. xiii

<sup>88</sup> M. Syafi'i Anwar, *Op-cit*, hal.225

pencitraan politik Islam sebagai suatu kekuatan di mata penguasa. Pencitraan yang dibangun dalam aktifitas komunikasi politik dengan ikut berperan aktif dalam sistem pemerintahan walaupun umat Islam sebagai kekuatan politik lebih melakukan strategi politik substansialistik, hal ini terkesan lebih elegan dan sesuai dengan perkembangan situasi politik pada saat itu, di mana pemerintah masih menganggap Islam sebagai "ekstrem kanan" yang harus tetap diwaspadai. Bentuk komunikasi yang dibangun masih dalam tataran propaganda politik, di mana lebih persuasif dalam melakukan tindakan-tindakan kebijakan politik.

Syafi'i Ma'arif menurut hemat peneliti lebih banyak melihat perubahan komunikasi politik yang dilakukan dengan cara merubah *image* pemerintah pada waktu itu untuk tidak meanggap bahwa ketakutan Islam politik sebagai ekstrem kanan yang harus diwaspadai keberadaannya. Retorika dan agitasi politik banyak dilakukan dikarenakan komunikasi yang dibangun banyak melibatkan pemerintah untuk mengetahui bahwa komunikasi politik yang dibangun oleh kekuatan politik Islam lebih terbuka dibandingkan pada masa lalu

## 1.2 Nurkholis Majid

Nurkholis Majid lahir di Mojoanyer Jombang, pada tanggal 17 Maret 1939. Jenjang pendidikannya diawali di Pesantren Gontor Ponorogo, kemudian kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab jurusan sastra dan sejarah Islam tamat tahun 1968. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan program Doktor di University of Chicago dan tamat pada tahun 1984 dengan disertasi berjudul *Ibn Taimiyah of Reasen and Revilation in Islam*.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Nurkholis Majid, *Islam Kelndonesiaan*, Mizan, Bandung, cet, III, hal.5.

M. Syafi'i Anwar berpendapat, bahwa Nurkholis Majid dikategorikan sebagai kelompok substansistik, dengan pikiran yang substansistik dimasukkan sebagai penekan bahwa substansi atau makna iman dengan peribadatan lebih penting dari pada formalitas dan simbolisme keberagamaan. Kaum substansialis menyadari bahwa Negara yang sedang berkembang baik secara ekonomi, politik, cultural dan social sangat berbeda dengan keadaan Saudi Arabia di zaman Nabi Muhammad SAW.

Nurcholis berpendapat, pada masa Orde Baru, peran komunikasi politik Islam memberikan suatu gambaran yang sangat tidak menguntungkan. Ia melihat partai politik Islam pada Masa Orde Baru tidak konsekwen terhadap institusi Islam itu sendiri melainkan hanya kepada partai Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa pemimpin politik Islam dalam melakukan komunikasi politik tidak mencerminkan penyaluran aspirasi umat Islam secara keseluruhan, melainkan hanya menyalurkan aspirasi kelompok Islam tertentu. Bahkan Nurcholis melihat ada elemen-elemen yang terlibat di dalam melakukan korupsi, manipulasi dan sebagainya, akibatnya timbul suatu ungkapan yang sangat sensasional "*Islam yes, Partai Islam no*".

Selain persoalan intern yang dihadapi umat Islam Indonesia ketika itu, Nurcholis juga melihat, adanya suatu realitas ketidak harmonisan pemerintahan Orde Baru dan politik Islam dalam proses komunikasi politik. Ini terlihat ketika Masyumi tetap tidak mendapatkan hak hidupnya sebagai kekuatan politik ketika itu, dan untuk itu pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan dengan membekukan peran politik Islam dalam satu fusi. Hal ini menunjukkan adanya

suatu penghancuran otonomi kekuatan politik, dan intervensi pemerintah Orde Baru yang sudah terlalu besar terhadap politik Islam.

Kendatipun dibidang politik terjadi depolitisasi, namun Nurcholis melihat Islam tetap berkembang pada dua dimensi yang lain, yaitu dimensi ritual dan dimensi kemasyarakatan. Bahkan pada masa pemerintahan Orde Baru Islam mengalami perkembangan fundamental dalam kehidupan beragama. Analisis teoritis demikian dapat menjelaskan munculnya fenomena baru kebangkitan Islam baik secara cultural maupun structural dalam memainkan peran politiknya. Perkembangan Islam sebagai kekuatan politik tidak terlepas dari komunikasi politik yang dibangun melalui proses pencitraan. Pencitraan dalam komunikasi politik sebenarnya bersumber dari arus bawah yang terbentuk berdasarkan informasi yang diterima oleh masyarakat pada waktu itu.

Konsep politik yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru, dengan diberlakukannya asas tunggal kesegala bentuk kehidupan bangsa Indonesia, dalam hal ini nurcholis tidak mempermasalahkannya, karena Islam sistem yang dianut oleh pancasila dan UUD 1945 merupakan nilai-nilai yang dibenarkan dalam ajaran Islam, sekaligus sebagai kesatuan politik bersama. Membandingkan tentang fungsi dan kedudukan pancasila tidak bertentangan dengan Konstitusi Madinah karena nilai-nilai yang dibenarkan dalam ajaran Islam dapat menjadi suatu kesepakatan antar golongan untuk membangun kekuatan politik bersama. Dengan pernyataan tersebut, Nurcholis berharap, agar umat islam dapat lebih terbuka menerima pancasila sebagai alat pemersatu didalam pemerintah Orde Baru.

## 2. Masa Pemerintahan Reformasi

Paradigma komunikasi politik umat Islam sebagian besar telah mengalami pergeseran mendasar, yang terjadi semenjak dekade 70-an. Karena kecewa terhadap *performance* Islam politik ketika itu. Perubahan itu tidak bisa dilepaskan dari peran para pemikir Islam yang berhaluan neo modernis (Nurcholis Madjid dan Syafi'i Ma'arif), yang kaya dalam gagasan liberal. Dalam bidang politik misalnya mereka berani mendemostrasikan terhadap narasi *Islam Politik* yang mereka anggap telah gagal dalam mengobjektivisasikan gagasan politik Islam pada masa Orde Baru.<sup>90</sup>

Disebabkan kegagalan yang berulang-ulang dalam kancah politik Orde Baru, yang melahirkan frustrasi di kalangan Islam, menjadikan komunikasi politik Islam sebagai oposisi yang termarginalisasi. Kendatipun demikian, banyak perkembangan yang menarik dalam umat Islam dimasa Orde Reformasi. Dalam hal ini penulis mencoba mengangkat beberapa pemikiran tokoh intelektual Islam tentang pandangan mereka terhadap peren komunikasi politik Islam di era Reformasi, yang penulis anggap pemikirannya banyak mempengaruhi konstelasi perkembangan komunikasi politik Islam di Indonesia, diantaranya adalah :

### 2.1 Amin Rais

Ia adalah ketua umum Muhammadiyah periode 1995-2000 yang juga pengajar Fisip UGM ini dilahirkan di Solo pada 26 April 1944. Pendidikan yang pernah ditempuhnya, adalah SD, SMP dan SMA Muhammadiyah Solo, jurusan Fisip hubungan Internasional Fisip UGM (1968), jurusan Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, mahasiswa luar biasa departemen bahasa Universitas Al-Azhar Mesir (1

---

<sup>90</sup> Al-Chair, *Pemilu 1999, Pertarungan Ideologi Partai-partai Islam Versus, Partai-partai Sekuler*, Jakarta, darul Falah, Cetakan I, 199, hal.71

Tahun), University Of Norte Dame, AS (Dr, Ilmu Politik, 1981), Post Doktoral, George Washington University UCLA, AS (1988-1989).<sup>91</sup>

Amin Rais adalah salah seorang dai dikalangan Islam, yang melihat peran komunikasi Politik Islam pada masa sebelum reformasi masih membaaur dalam situasi struktural pemerintah, sehingga banyak merugikan Islam dan Umat Islam itu sendiri. Menurut Amin, kenyataan itu disebabkan oleh kondisi pada waktu itu kurang menguntungkan dan basis kultural pemahaman keagamaan pun masih sangat lemah. Berbeda sekali kondisinya pada masa reformasi dimana pemahaman umat terhadap politik sudah semakin membaik. Kalau pada masa Orde Baru ia tidak menyetujui suatu konsep Negara Islam yang diperjuangkan oleh sebahagian tokoh Islam dikarenakan adanya suatu intimidasi dari rezim Orde Baru yang menganggap peran partai Politik Islam dapat membahayakan kesetabilan Nasional. Namun sekarang ini menurut Amin kita tidak mesti takut untuk mengungkapkan perlunya Negara Islam bagi rakyat Indonesia yang mayoritas Islam dalam menjalankan sistem pemerintahannya.<sup>92</sup>

Dalam persoalan peran komunikasi politik Islam yang dimainkan melalui partai politik, ia melihat melalui sudut pandang theology. Pertama tidak ada ayat Al-qur'an ataupun hadist yang mengharuskan memiliki asas Islam dalam membangun suatu Negara. Bahkan ketika membangun Negara Madinah, Nabi mengajak kaum Yahudi dan Nasrani. Kedua alasan rasional, dalam sejarah Indonesia belum pernah partai-partai Islam mempunyai mayoritas suara dalam

---

<sup>91</sup> M. Amin Rais, *Membangun Politik Adi Luhung, Membumikan Tauhid Sosial menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*, Zaman Wacana Mulia, Bandung, 1998, cetakan I hal.16

<sup>92</sup> Al-Chair, *Reformasi Prematur, Jawaban terhadap reformasi Total*, darul Falah, Jakarta, Cetakan III, hal.179

pemilu. Bahkan pada Masyumi jaya, dimana umat Islam sangat solid berhimpun dibawah payung besar Masyumi, partai Islam itu tidak dapat memperoleh suara mayoritas. Ketiga, ada kekuatan luar biasa dari sebahagian kelompok minoritas yang mendapat dukungan dari pihak Internasional kalau kita mendirikan partai berasaskan agama.<sup>93</sup>

Dalam hal ini Amin melihat yang paling penting adalah menguatkan basis cultural umat Islam agar mampu memainkan peran komunikasi politiknya, dengan meningkatkan kredibilitas para tokoh politiknya, sembari memberikan proses pencerahan kepada masyarakat dalam kehidupan keberagamaan maupun politik, hal ini dilakukan baik secara individu maupun kelompok, sehingga konsep amar ma'ruf nahi mungkar dapat dijalankan dalam sistem pemerintahan, sehingga kekecewaan pada masa lalu tidak terulang kembali.

Proses komunikasi politik bentuk yang ditawarkan oleh Amin Rais masih dalam bentuk agitasi politik. Maksud dari agitasi politik di sini di mana umat Islam sebagai suatu kekuatan politik mampu menggerakkan berbagai elemen potensi yang dimiliki umat Islam dengan cara membangkitkan nilai-nilai sentimen keagamaan untuk dapat mewujudkan suatu kondisi kehidupan perpolitikan yang lebih baik lagi.

## 2.2 Eef Saefullah Fatah

Eef Saefullah Fatah lahir di Cibarusah, Bekasi, pada 13 November 1967. Ia menyelesaikan pendidikan S1 pada program studi politik Indonesia jurusan ilmu politik Fisip UI, Depok 1994, menulis skripsi dengan judul "Negara Orde Baru dan Pengadilan Konflik 1967-1998; Studi terhadap peristiwa malaria, Petisi

---

<sup>93</sup> M.Amin Rais, *Dari Yogya ke Bina Graha*, Gema Insani press, Jakarta, 1999, Cetakan I, hal.76.

50 dan tanjung periok". Saat ini bekerja sebagai staf pengajar di Fisip UI Depok, wakil Direktur I lboratorium Ilmu Politik Fisip UI, Wakil Pimpinan redaksi seri penerbitan studi politik (Mizan dan Lip Fisip UI), dan kepala litbang harian Republika. Menjadi anggota persiapan pembentukan komisi pemilihan Umum (P3KPU) yang disebut juga tim sebelas (sebelas tim yang diketuai Nurcholis Madjid, yang antara lain bertugas menyeleksi tidak kurang dari 147 partai politik yang layak diikutsertakan dalam pemilu 7 Juni 1999).<sup>94</sup>

Eep melihat pada masa Orde baru peran komunikasi politik Islam terbawa arus sistem Orde Baru yang anti demokrasi, dengan malapetaka politik dan ekonomi yang harus diderita oleh bangsa ini secara keseluruhan. Politik Indonesia pasca Soeharto kemudian ditandai oleh perkembangan yang sangat dramatis, sehingga dinamika politik mengalami percepatan luar biasa. Dalam konteks itu tahun 1998 adalah tahun yang sangat penting dalam wacana demokrasi Indonesia pasca Orde Baru. Dalam hal ini, komunikasi politik Islam dalam wacana demokrasi Indonesia terkesan masih mencari sebuah format yang pas di era reformasi ini sangat kritis setelah Orde Baru runtuh.<sup>95</sup>

Dalam konstalasi komunikasi politik Islam Indonesia sekarang ini menurut Eep, adanya suatu kekhawatiran terhadap partai-partai berasaskan Islam, mungkin disebabkan belum siapnya pemahaman umat terhadap politik secara kultural dalam berjuang dengan *platform* Islam itu. Dua generasi selama empat dekade nyaris telah berlalu, dimana Islam sebagai kekuatan politik telak dikesampingkan, yakni sejak dibubarkannya Masyumi ditahun 1962. Apalagi pada saat sekarang ini

---

<sup>94</sup> Eep Saefullah Fatah, *Membangun Oposisi Agenda-Agenda Perubahan Politik Masa Depan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, Cetakan I, Hal.215

<sup>95</sup> *Ibid*, hal, VII

politik Islam sedang berada dalam proses pergumulan "keluar dan kedalam". Dalam kekhawatiran ini Eep melihat adanya sekelompok umat dalam mencari solusi. Karenanya pertimbangan taktis dan strategis dikalangan politisi tertentu ada beberapa tokoh Islam mendirikan partai nasionalis terbuka dan berorientasi sekuler akan tetapi nuansa keislamannya juga cukup menonjol. Umat Islam Indonesia dalam memainkan peran komunikasi politiknya perlu membangun suatu jaringan komunikasi politik untuk menerapkan suatu sistem demokrasi baik sesama partai politik Islam maupun dengan partai lainnya yang tujuannya tetap memperjuangkan aspirasi umat Islam. Hal ini dimaksudkan untuk menginspirasi agar kekecewaan umat Islam Indonesia tidak terulang kembali dalam lintasan sejarah politik Indonesia. Dalam hal ini, Amien dan Eep melihat bahwa basis cultural merupakan faktor yang terpenting dengan menggunakan berbagai bentuk komunikasi politik selain faktor lainnya dalam proses penyadaran berpolitiknya umat Islam Indonesia.

## **B. Peran Komunikasi Politik Islam**

### **1. Pemerintahan Orde Baru**

Ditinjau dari sudut manapun, runtuhnya Orde Lama dan Bangkitnya Orde Baru, tetap merupakan persoalan yang amat penting bagi bangsa Indonesia, baik menyangkut perubahan ekonomi maupun pemikiran social masyarakat.<sup>96</sup> Meskipun sebenarnya, antara Orde lama dan Orde Baru hampir tidak ada perubahan yang mendasar, karena secara politik Orde Baru merupakan kelanjutan dari Orde Lama dan faktor serta aktor "pembuat kekuatan politiknya pun" tidak

---

<sup>96</sup> Fachry Ali dan Bahtiar Efendi, *Merabah Jalan Baru Islam, Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Bandung Mizan, Cetakan II, 1986, hal.93

berbeda jauh, tetapi dalam pembangunan ekonomi antara kedua Orde ini terdapat perbedaan prinsipil.

Saat diruntuhkan Orde Lama yang sering dianggap keliru dalam menjalankan pembangunan, umat Islam bersama ABRI dan mahasiswa sangat mendorong lahirnya satu kepemimpinan baru yang lebih dinamis.<sup>97</sup> Karena itu menurut M. Rusli Karim ketika satu orde yang kemudian dikenal dengan Istilah Orde Baru terbentuk, umat Islam tampil dibarisan terdepan, terutama dalam membubarkan partai komunis Indonesia (PKI). Lebih lanjut Rusli menyebutkan, paling tidak ada tiga pilar dasar yang dilakukan umat Islam dalam membubarkan PKI.<sup>98</sup>

Pertama, umat Islam melalui organisasi-organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan ikut melakukan demonstrasi kejalan-jalan agar PKI dibubarkan. Kedua, melakukan dialog dengan pemerintah agar mau membubarkan PKI. Ketiga, ikut membumihanguskan PKI bersama ABRI dan Instrumen lainnya. Ketiga elemen dasar ini menjadi bukti bahwa umat Islam Indonesia sangat berperan sekaligus mempunyai saham yang besar dalam membangun Indonesia Orde Baru.

Tetapi ketika orde Baru terbentuk, keadaan pun berubah. Umat Islam tidak menikmati kondisi yang kondusif seperti yang diharapkan. Harapan yang besar akan terciptanya hubungan baik antara umat Islam dan pemerintah dalam menjalin komunikasi politik musnah sudah. Pemerintah tidak lagi bekerjasama

---

<sup>97</sup> M.Rusli, *Partai Politik Indonesia sebuah Pasang Surut*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hal.153

<sup>98</sup> M.Rusli Karim, *Islam dan Sejarah Orde Baru*, *Republika*, Jum'at, 22 Desember 1996, hal.6

dengan umat Islam, seperti pada masa pembubaran PKI dan Orde Lama. Bahkan pemerintah menciptakan konfigurasi baru yang berporos pada eratnya hubungan meliter dan "big bussnis", sehingga berseberangan dengan strategi "group islam". Langkah selanjutnya,<sup>99</sup> pemerintah Orde Baru melebarkan fungsinya menjadi mesin politik dan merekayasa kehidupan komunikasi politik umat Islam Indonesia. Salah satu bukti bahwa pemerintah merekayasa kehidupan komunikasi politik umat Islam adalah dilarangnya merehabilitasi Masyumi oleh eks pemimpinnya, padahal partai ini pernah Berjaya dan dipandang paling modern jika dilihat dari pada pemimpinnya yang terdidik di Barat.<sup>100</sup> Pelarangan terhadap rehabilitasi Masyumi ini, dilanjutkan dengan rekayasa pemerintah untuk menciptakan partai politik Islam yang baru, yang kemudian dikenal dengan Partai Muslimin Indonesia (PMI atau Permusi), Rekayasa pemerintah sangat terlihat pada penentuan ketua umum partai, yang tidak dibolehkan dari kalangan bekas pengurus Masyumi.<sup>101</sup> Akibat yang terjadi, pemimpin yang muncul adalah mereka yang sama sekali tidak mempunyai basis dan kharismatik dikalangan umat Islam, sebab tokoh kharismatik Islam pada masa itu dilarang untuk menjadi pemimpin partai politik yang baru terbentuk.<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, interpretasi, Untuk Aksi*, Bandung, Mizan, 1991, hal.179.

<sup>100</sup> Nurcholis Madjid, *Tradisi Islam*, Yayasan wakaf Paramadina, 1997, hal.137

<sup>101</sup> Campur tangan pemerintah dalam penentuan Permusi sejak awal berdirinya telah membuat partai Islam baru ini tidak leluasa dalam menentukan pemimpin yang benar-benar berwibawa dan berpengalaman luas serta mempunyai pengaruh dalam masyarakat Islam. Satu-satunya pemimpin yang memenuhi persyaratan serta diduga dapat diterima pemerintah pada saat itu ialah Muhammad Roem. Akan tetapi saat menjelang akhir muktamar Parmusi di Malang peserta dikejutkan oleh adanya telegram dari sekretaris Negara, Alamsyah, yang menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat menyetujui Muhammad Roem sebagai pemegang tampuk pemimpin tertinggi Parmusi. Lihat m.Rusli KARim, *Dinamika Islam Indonesia, Suatu Tinjauan politik*, hal.187

<sup>102</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Mizan, Bandung, 1997, hal, 141.

Dalam konteks ini umat Islam sangat kecewa terhadap komunikasi politik yang dilakukan pemerintah orde Baru sebab berakhirnya Orde Lama, yang sering menekan umat Islam, diharapkan dapat pulih ketika Orde Baru bangkit. Namun pada kenyataannya "*Islam politik*" yang diperjuangkan mereka sama sekali tidak mengarah kepada tujuan yang dicita-citakan.<sup>103</sup> Kekuasaan partai politik tahap demi tahap digantikan oleh Angkatan Bersenjata, seperti yang terjadi pada masa Orde Lama.

Walaupun umat Islam dalam memainkan peran komunikasi politiknya, seperti diungkapkan Kuntowijoyo bergerak karena kesadaran,<sup>104</sup> tidak karena keuntungan-untungan material seperti kekuasaan politik, kepentingan kelas, atau kepentingan golongan, tapi bagaimanapun, dalam diri umat Islam pada waktu itu, politik merupakan bahagian dari ajaran Islam itu sendiri<sup>105</sup> ditambah lagi adanya kenyataan bahwa umat Islam merupakan penduduk mayoritas Indonesia. Jadi sangat wajar jika dalam sistem perpolitikan ingin berperan menjalankan strategi komunikasi politiknya dengan leluasa.

Kecedrunan umat Islam yang demikian itu, berbanding terbalik dengan keinginan pemerintah Orde Baru. Menurut William Liddle, pemerintah telah menempatkan Islam politik sebagai yang membahayakan bagi pemerintah, bahkan kegiatan komunikasi politik Islam pada masa Orde Baru dinamakan "*ekstrem kanan*" sebagai ujung lain dari "*ekstrim kiri*" yang disimbolkan kepada PKI.

---

<sup>103</sup> M. Rusli Karim, *Dinamika Islam Indonesia, Suatu Tinjauan politik*, Hanindit, Jakarta, hal.187

<sup>104</sup> *Ibid*, 142

<sup>105</sup> M.rusli, *Op-cit*, hal.167

Kondisi seperti disebut di atas, menyebabkan umat Islam bersikap antipasti terhadap kebijakan pemerintah. Dalam kondisi seperti ini timbullah apa yang disebut hubungan *hegemonic* yang *antagonik* antara pemerintah dan umat Islam.<sup>106</sup> Pada Konteks ini pemerintah menjadi sangat kuat, dan berusaha untuk selalu menjadi yang kuat dengan cara melemahkan "*civil Society*". Dengan kata lain, Negara secara dopolitisasi menguasai aktifitas kehidupan social politik, dan menghambat komunikasi politik dikalangan umat Islam Indonesia.

Kuntowijoyo dalam menilai keadaan peran komunikasi politik Islam pada Orde Baru mengatakan bahwa pemerintah tidak begitu ramah terhadap komunikasi politik Islam. Apa yang dialami sesudah 1965 tidak jauh menyimpang dari sebelumnya, peran komunikasi politik Islam kembali terpojokkan oleh pengulangan sejarah. Peran komunikasi politik Islam ditinggalkan oleh sejarah, seakan-akan umat Islam selalu terancam dan berjalan dari kekecewaan. Peran komunikasi politik Islam melalui gerakan-gerakan yang dilakukannya, menurut Kuntowijoyo pada waktu itu terpecah dengan populasi yang bervariasi. Di dalam perpecahan itu terdapat beberapa golongan dalam memainkan peran komunikasi politiknya, antara lain golongan *Integrasionis kompromis* yaitu pemimpin Islam yang duduk dipemerintahan dan Golkar. Golongan *integrasionis-non kompromis* yaitu yang duduk dalam kepartaian Islam. Golongan *isalasionis kompromis* yaitu yang tidak percaya kepada lembaga keislaman yang mapan maupun kepada arus utama politik, tetapi menerima sistem social dan social dari pemerintahan

---

<sup>106</sup> Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Politik Orde Baru*, Gema Insani Press, Jakarta, hal. 206.

Golongan *isolasionis non kompormis* yaitu yang menolak baik lembaga keislaman yang mapan maupun arus utama politik dan dari pemerintahan.<sup>107</sup>

Apa yang dialami umat Islam dengan kasus Parmusi itu ternyata berlanjut sampai berkepanjangan. Penampilan pemimpin yang harus dimiliki satu syarat pokok yang sebenarnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan syarat sebagai pemimpin, dilihat dari perpektif yang luas, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan sistem politik nasional. Dilihat dari sudut ini, maka apa yang dialami partai-partai Islam dalam menjalankan komunikasi ketika mengajukan daftar nama-nama calon yang akan ditokohkan dalam pemilihan umum 1971, sekali lagi melihat, bekas tokoh Masyumi, yang semula diduga dapat menjadi alat menarik massa tidak direstui oleh pemerintah.

Pemilihan umum yang pertama Orde Baru ini, oleh partai Islam pada mulanya merupakan harapan baru untuk bisa bangkit kembali dan sekaligus merupakan batu ujian untuk melihat seberapa besar dukungan massa Islam.<sup>108</sup> Dua partai besar Islam pada waktu itu NU dan Parmusi begitu semangat dalam berkampanye, tetapi apa yang terjadi, ternyata harapan dari partai Islam, termasuk juga partai lainnya, untuk bangkit tidak menjadi kenyataan. Keberpihakan pemerintah dan ABRI kepada Golkar telah membuat partai Islam semakin terjepit. Melalui pemerintah, Golkar telah mendapat suatu kemudahan dalam segala usaha untuk meraih kemenangan, dan dengan bantuan ABRI keamanan Golkar bisa terjamin. Keadaan inilah yang menyebabkan pemilihan umum 1971 ditandai oleh

---

<sup>107</sup> M.Rusli Karim, *Dinamika Islam Indonesia, Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*, Hanindita, Yogyakarta, 1985, hal.192

<sup>108</sup> *Ibid*, hal 193

kelicikan Golkar.<sup>109</sup> Partai Islam dalam gerak komunikasinya pada waktu itu sangat dibatasi pengaruhnya, terutama di daerah-daerah kantong Islam, seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan lain-lain, begitu juga eks tokoh Masyumi tidak dapat melakukan kampanye terbuka.

Dilain pihak, permunculan Golkar sedikit banyak menimbulkan kecurigaan di kalangan umat Islam, karena banyak personil yang diorbitkan berasal dari agama non Islam yang tidak proposional. Dengan kekuatan yang dominan itu Golkar dapat leluasa mengarahkan kendali politik, termasuk keinginan menciutkan partai-partai Islam melalui proses fusi yang dilakukan oleh pemerintah pada bulan Januari 1973, sehingga sejak itu partai Islam dibentuk menjadi satu di bawah bendera PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

Memasuki dasawarsa 1980-an permasalahan komunikasi politik Islam ternyata semakin bervariasi dan rumit dengan ditetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan. Memasuki dasawarsa 1980-an permasalahan komunikasi politik Islam ternyata semakin bervariasi dan rumit dengan ditetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui UU no: 3 tahun 1983.<sup>110</sup> Munculnya gagasan penyeragaman asas "*partai Politik*" yang dicanangkan Presiden Soeharto pada pidatonya di depan sidang pleno DPR, 16 Agustus 1982, mau tak mau, melibatkan politik Islam karena PPP sendiri berasaskan Islam, apalagi ketika ditelaah secara cermat

---

<sup>109</sup> Kelicikan Golkar terlihat dalam melakukan kampanye dengan cara menerapkan sistem *money politic* di daerah basis politik Islam, dari hasil fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

<sup>110</sup> Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru, Perubahan Politik dan Keagamaan*, PT. tiara Wacana, Yogyakarta, 1993.hal.5

rangkaian isi pidato Presiden Soeharto tersebut, yang menyebutkan pengalaman bangsa kita pada masa demokrasi Liberal/ Parlementer.<sup>111</sup>

Pengungkapan sejarah ini diakui atau tidak, berarti memandang sikap komunikasi politik partai Islam dikala itu, termasuk salah satu faktor penyebab terjadinya perpecahan bangsa. Dengan kata lain, fanatisme Islam, seperti sering diungkit dalam kampanye pemilihan umum 1982 bisa membawa perpecahan bangsa.<sup>112</sup> Dengan latar belakang itulah lalu perlu dihilangkan "tali" yang dapat mempertautkan agama dengan kehidupan bernegara. Pada mulanya penyeragaman asas ini hanya bagi organisasi politik, tetapi pada perkembangan berikutnya, juga diberlakukan pada organisasi-organisasi sosial, massa dan keagamaan. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa Pancasila merupakan prestasi tertinggi pemerintah Orde Baru, dan oleh karenanya semua prestasi lainnya dinamakan sebagai istilah Pancasila, mulai dari sistem ekonomi Pancasila, pers Pancasila, hingga Orde Baru pun disebut Orde Pancasila, yang telah menghambat peran komunikasi politik Islam pada masa Orde Baru. Tapi anehnya masih ada partai politik Islam pada masa reformasi yang memakai Pancasila sebagai asasnya.

Kebijakan asas tunggal dilatar belakangi semangat mengamankan perolehan suara Golkar dalam pemilu 1987. Strategi yang diberlakukan pemerintah sebenarnya sama saja dengan kebijakan fusi partai pada tahun 1973. Muhammadiyah dan majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak keberatan Pancasila dijadikan asas tunggal. Sedangkan Mahasiswa Islam (HMI) yang merupakan asset

---

<sup>111</sup> Adanya tokoh-tokoh Islam dengan fanatisme Islam ingin memisahkan diri dengan Negara republic Indonesia, cara melakukan pemberontakan (DI/TII aceh, Jawa Barat, Sulawesi Selatan) yang bertujuan ingin mendirikan Negara Islam

<sup>112</sup> M.rusli K.Arim, *Op-cit*, hal.210

intelektual mudah Islam Indonesia terbelah dalam kedua kelompok. Kelompok *Mainstream* dapat menerima asas tunggal Pancasila, sedangkan sempalannya, Majelis Penyelamat organisasi (MPO) menolak,. Pelajar Islam Indonesia (PII) merupakan satu-satunya ormas Islam yang menentang asas tunggal, yang kemudian berlanjut kepada pembubaran ormas ini oleh pemerintah Orde Baru. Respon umat Islam terhadap pemberlakuan asas tunggal terdapat dalam dua dimensi yaitu politis dan theologies. Kelompok penerima melihat asas tunggal sejalan dengan ukhuwah Islamiyah, sedangkan kelompok penentang melihatnya bertentangan dengan tauhid.<sup>113</sup>

Konsepsi Islam politik berhaluan radikal, dalam kasus penolakan asas tunggal, muncul akibat adanya rasa ketertindasan secara sosial dan politik. Para tokoh garis keras Islam ketika itu yakin bahwa kekuasaan Orde Baru ditopang oleh tiga pilar utama, ABRI, Golkar dan Konglomerat China, yang secara tidak langsung menjadikan politik Islam sebagai target penyingkiran.<sup>114</sup> Dalam hal ini Islam garis keras merespon asas tunggal bertentangan dengan konsep tauhid. Militer lalu menjawabnya dengan politik dominasi berlumuran kekerasan. Rangkaian tindakan rezim Orde Baru yang secara sistematis melakukan marginalisasi terhadap Islam politik dan aktifitas komunikasi politik tersebut sebangun dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap Islam. Rezim Orde Baru berpandangan bahwa keterlibatan Islam dalam politik cenderung mengganggu kesetabilan politik dan karena itu mengganggu gerak pembangunan.

---

<sup>113</sup> Faisal Ismail, *Ideologi, Hegemoni dan Otoritas Agama*, (terjemahan, Imron Rosyidi), tiara Wacana, Yogyakarta, 1999, hal,205.

<sup>114</sup> *Ibid*, hal.210

## 2. Pemerintahan Reformasi

Dalam berpolitik orang berpikir tentang perang. Ada "*hukum perang*", bahwa yang kalah akan dilumpuhkan, dan yang menang akan menggunakan segala cara untuk berkuasa. Masa lalu umat Islam, tidak saja di Indonesia, sering menghantarkan umat menjadi cemas dengan kemenangan politik kelompok sekuler. Di Indoneisa tidak ada penjelasan yang optimis terhdap pembubaran Partai Islam Masyumi oleh Soeharto masa lalu. Umat Islam menyimpulkan kejadian ketika itu "karena Soekarno sekuler" maka Soekarno pada waktu itu menganak emaskan PNI (Partai Nasional Indonesia), PKI (Partai Komunis Indonesia) serta membubarkan Masyumi.

Kebijakan pemerintah soeharto terhadap umat Islam dan partai politik Islam sebenarnya tidak berbeda dengan kebijakan pemerintah Orde Lama sama-sam menghambat aktifitas omunikasi politik yang dilakukan oleh partai Islam.. Bahkan apa yang terjadi pada masa soeharto menyimpan luka yang lebih besar dalam kesadaran umat Islam. Sejak awal, soeharto bukanlah pilihan yang ideal. Kehadirannya dipentas politik disadari benar, tiba-tiba ia sudah menjadi diktator besar. Bayak perlakuan yang dicatat dari hal diskriminatif yang ia buat terhadap politik Islam, misalnya penolakan Soeharto terhadap rehabilitasi Masyumi, pemaksaan fusi partai-partai Islam yang sepakat dengan paket asas tunggal dan perubahan lambing ka'bah di PPP, peristiwa Tanjung Periok, Lampung, Aceh, Komando jihad, dan lain-lain. Dengan demikian, kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap partai-partai politik Islam merupakan pengulangan sejarah (kelanjutan Orde Lama).

Sejarah yang sama adalah sejarah penghianatan kelompok karakter sekuler, yang merupakan sejarah yang menikam dari belakang. Karena itu sulit bagi umat Islam (termasuk warga NU) bisa dengan ikhlas menerima kehadiran penguasa baru yang dikendarai PDI Perjuangan.<sup>115</sup> Orang Islam mengetahui disana ada Theo Safi'I yang kaset ceramahnya beredar luas dikalangan umat Islam. Dalam beberapa bahagian ucapannya Theo mengatakan bahwa Muhammadiyah itu fundamentalis (termasuk Amin Rais tentunya), Al-qur'an tidak lengkap, kata-kata Ulama tidak di dengar Tuhan, dan sebagainya, yang kesemuanya sangat menyakitkan umat Islam.

Dalam benak umat Islam, PDI Perjuangan tidak akan memperjuangkan aspirasi mereka. Ini terlihat antara lain dari penetapan caleg-caleg non Muslim yang akan mewakili umat Islam di DPR RI. Sementara proses komunikasi politik terus berjalan, kita sulit meminta umat Islam berbaik sangka terhadap semua kebijakan PDI Perjuangan.

Ada dua hal yang menarik dikaji tentang peran komunikasi politik Islam di era reformasi ini. Pertama kekalahan umat Islam dan kedua tentang strategi parpol Islam. Dalam hal ini kekalahan parpol Islam dalam pemilu 7 Juni 1999 adalah kekalahan umat Islam secara keseluruhan.<sup>116</sup>

Ironisnya memang parpol Islam harus menerima kekalahan ditengah 116 juta pemilih yang mayoritas umat Islam. Tentu saja banyak kekecewaan yang muncul dikalangan umat Islam, hal ini disebabkan menurut penulis kurangnya

---

<sup>115</sup> Eep Saefullah, *memahami Posisi Politik Umat Islam, Republika*, Jum'at 23 Juli 1999, No.153, thn. Ke-7.

<sup>116</sup> Abu Bakar E. Hara, *Parpol Islam dan Kelanjutan Era Reformasi, Republika*, Jum'at 23 Juli 1999, No.153. Thn. Ke-7

figur yang dapat dijadikan contoh, pendidikan politik arus bawah kurang diperhatikan oleh tokoh-tokoh politik Islam dalam menjalankan fungsi perpolitikkannya, sehingga pendekatan pendekatan persuasif dengan pemilih terbesar pada saat itu (masyarakat arus bawah) kurang optimal dilakukan, bentuk komunikasi seperti ini harus dapat diterapkan dengan baik terlebih lagi, jika kondisi sosio kultural masyarakat pemilih masih berada pada lapisan masyarakat kelas bawah.

Terlebih lagi jika kemudian partai yang tidak berbasis massa Islam dapat mengambil suara umat Islam yang mayoritas. Jika kekalahan parpol Islam dalam pemilu 7 juni 1999 dikaji kembali, tampaknya segi sosio politik lebih penting dari pada aspek sosio-relgius. Menitik beratkan pada aspek sosio-relgius hanya akan terjebak kepada simplikasi persoalan yang seolah-olah faktor keagamaan yang harus dipertanyakan, baik keberadaan partai atau kualitas religius simemilih.<sup>117</sup> Tinjauan terakhir ini hanya kembali berkuat pada perdebatan antara "*Islam Kultural dan Islam struktural*" atau "*Islam Subtansial dan Islam Formal*". Lebih jauh dari itu, pendekatan Sosio-relgius justru akan memperkuat asumsi bahwa "*Islam Struktural atau Islam Formal*" tidak relevan untuk konteks Indonesia.

Terlepas dari perdebatan "Islam Struktural" dan Islam Kultural" kehadiran parpol Islam secara praktis memang dibutuhkan, bukan sekedar untuk menjamin adanya perwakilan aspirasi umat, tetapi juga untuk maewarnai konstelasi komunikasi politik dengan nuansa religius. Dengan munculnya parpol Islam maka dimensi moral agama dalam percaturan politik, termasuk produk kebijaksanaannya, tidak diabaikan seperti yang terjadi pada masa sebelumnya.

---

<sup>117</sup> Farid Wajdi, *Kalah Menang Bagi Parpol Islam*, *Republika*, Rabu 30 Juni 1999, No.170 Thn.ke-7

Kini kehadiran parpol Islam dalam era reformasi dihadapkan pada kenyataan pahit sehingga memperkecil peranannya dalam konstelasi komunikasi politik nasional setelah melihat perhitungan suara pada pemilu lalu. Parpol Islam yang semula diharapkan dapat mendulang suara umat Islam ternyata tidak terwujud. Bahkan ironisnya walaupun suara parpol Islam digabungkan jumlahnya melalui *stembus accord* yang pernah disepakati, masih belum cukup menempati peringkat diatas.

Ada beberapa pihak yang ingin membetulkan letak persoalan kekalahan umat Islam dalam pemilu 1999, yakni dengan mengatakan yang kalah itu bukanlah Islam tetapi partai-partai Islam, sementara umat Islam ada yang menang dan ada yang kalah, tergantung kepada partai mana yang mereka pilih. Ungkapan yang bernada *apologetic* dan cenderung berupaya melepaskan beban dan tanggung jawab moral terhadap kekalahan umat Islam itu, bagaimanapun ada benarnya, jika pada analisa pertama kita memisahkan antara Islam yang *theology* dan Islam yang sosio-kultural.

Melihat kekalahan umat Islam ini, sekaligus harus melihat mereka yang berada dijalur inklusif maupun jalur eksklusif. Masing-masing mempunyai persoalannya dan sisi kelemahan maupun kekuatan. Kekalahan yang diderita partai Islam, yakni partai-partai yang kembali memberanikan diri berasaskan Islam di masa Reformasi ini sambil melepaskan ketertarikannya dengan Pancasila sebagai asas tunggal seperti PUI (PARTAI UMAT ISLAM), PK (partai Keadilan), SUNI, dan PKNU (partai Nahdhatul Ulama), kecuali PPP yang sesungguhnya diciptakan rezim Orde Baru yang bertujuan melunakkan umat Islam ketika itu, nyaris tak satupun yang keluar sebagai pemenang. Jumlah kursi yang mereka

dapatkan tak cukup untuk membikin mereka keluar dari persyaratan minimal dua persen untuk bisa tampil lagi pada pemilu lima tahun mendatang.<sup>118</sup>

Kekalahan parpol-parpol Islam itu tampaknya tidak terlepas dari keberhasilan kebijakan komunikasi politik Islam masa Orde Lama dan Orde Baru yang identik dengan politik Islamnya pemerintah kolonial. Pola penanganan Islam oleh pemerintah kolonial (kebijakan politik Islam) terus berlanjut sampai setelah kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada masa pemerintah kolonial Belanda Islam sebagai agama peribadatan dan seremoni diperbolehkan, dan bahkan bila perlu didukung, tetapi Islam sebagai kekuatan budaya politik tidak diperbolehkan. Tradisi pemasungan politik Islam yang berlangsung selama empat decade berturut-turut inilah yang diterima oleh generasi muada Islam, sehingga Islam yang berbentuk seremonial dan lembut lebih berperan daripada yang integral dan menyeluruh (kaffah) serta revolusioner dan dinamis.

Ada ketakutan dan kerisihan Islam sebagai kekuatan politik yang dihidupkan kembali, karena Islam sebagai kekuatan politik selalu di identikkan dengan gerakan-gerakan DI-TII dimasa lalu, serta gerakan teroris yang dihembuskan oleh Barat. Politik Islam fobia inilah yang menyebabkan bahagian terbesar dari umat Islam tidak memilih partai-partai Islam. Alasan ketakutan dan kerisihan terhadap Islam politik inilah, agaknya yang mendasari pemikiran PKB (partai Kebangkitan Bangsa) dan PAN (partai Amanat Nasional) untuk tidak berasaskan Islam, mereka lebih memilih berasaskan Nasional terbuka dan menerima anggota dari berbagai latar belakang agama dan kesukuan.

---

<sup>118</sup> Mochtar Naim, *kekalahan Partai Politik Islam, Republika*, Selasa 15 Juli 1999, No.183 Thn. Ke-7.

Banyak pertanyaan mendasar yang muncul disekitar kemenangan PDI Perjuangan, dan kekalahan yang diderita oleh partai-partai Islam. Kenapa PDI Perjuangan yang kurang mengkedepankan isu-isu reformasi, bahkan PDI Perjuangan tidak segan-segan diceritakan sebagai partai konservatif yang potensial menjadi kekuatan *status quo* baru, bisa menang? Kenapa partai Islam bisa kalah?. Bukankah partai Islam yang dengan lantang memperjuangkan aspirasi umat Islam yang seharusnya memperoleh dukungan yang signifikan dari mayoritas umat Islam?.

Kuntowijoyo, sejarawan dan budayawan muslim terkemuka dalam setiap studi kesejarahan yang dilakukannya selalu mengemukakan adanya *pararelisme* mengenai berulangnya kembali fenomena *periferalisasi* Islam pada setiap zaman. Menurut Kuntowijoyo, segala bentuk periferalisasi yang dialami oleh umat Islam di Indonesia dapat diurut semenjak masa Demak dan Mataram kemudian berlanjut pada masa Orde Baru. Melihat perolehan suara jauh dari apa yang diharapkan, banyak dari kalangan elit politik Muslim di tanah air mengkhawatirkan umat Islam bakal mengalami periferiliasasi untuk kesekian kalinya.<sup>119</sup>

Hal ini wajar untuk bisa memasuki *mainstream* politik sekaligus menjadi pemain yang diperhitungkan. Karena itu, umat Islam harus memiliki lokomotif komunikasi politik, sekaligus menjadi pemain yang diperhitungkan untuk meningkatkan perolehan suara dalam pemilu sebab dengan perolehan suara yang pas-pasan partai Islam diragukan menjadi lokomotif komunikasi politik bagi umat Islam. Bertolak dari kenyataan yang demikian, dapatlah dimaklumi jika

---

<sup>119</sup> Syamsul Arifin, *Kristalisasi Kekuatan Islam politik, Republika*, Jum'at 27 Agustus 1999, No.227. Thn. Ke-7

belakangan muncul gagasan "*controversial*" dari sebahagian tokoh politik muslim tentang perlunya membentuk fraksi Islam.

Kenapa "Islam Politik" seakan-akan ditakdirkan dalam posisi periferial? Banyak faktor yang bisa dikemukakan. Tetapi yang terpenting harus dipahami kekalahan partai Islam sebenarnya tidak lebih sebagai akibat dari dangkalnya apa yang disebut estetika penerimaan umat Islam terhadap gagasan Islam dalam bidang politik. Kadang kala itu tampak dalam bentuk-bentuk artikulasi yang cenderung simbolik dan artificial dalam bertpolitik. Kebanyakan partai-partai Islam, biasanya sudah merasa cukup pula jika hanya mendasarkan pada sentiment lama yang sangat klasik, pada hal pada dasarnya cara seperti itu terbukti menjadi garis polaritas umat. Elit politik juga sering terjebak pada romantisme masa lalu seperti ingin kembali menghidupkan Masyumi yang di anggap sebagai partai ideal sepanjang sejarah politik Islam di Indonesia.

Pada dasarnya aspirasi umat Islam terhadap politik sebahagian besar telah mengalami pergeseran mendasar ketika Islam politik ingin dihidupkan kembali di era Reformasi oleh sejumlah elit politik Muslim melalui pendirian partai berlabel Islam, terbukti kurang memperoleh aspirasi serta dukungan yang berarti dari umat Islam, kecuali PPP yang diuntungkan dengan jutaan massanya yang komit. Dalam hal ini sangat memungkinkan partai-partai Islam itu akan menjadi korban undang-undang nomor 3/1999 (tentang partai peserta pemilu) yakni tidak bisa mengikuti pemilu berikutnya karena gagalnya meraih dua persen kursi di DPR.

Dengan demikian, pelajaran berharga yang bisa diambil dari kesalahan partai-partai Islam dalam memainkan strategi komunikasi politik itu adalah, bahwa dalam bertpolitik tidak hanya cukup mengedepankan label, tetapi juga perlu

melakukan objektivitas terhadap nilai-nilai dasar Islam dan rasionalisasi terhadap kondisi objektif bagi pemilih. Oleh karena itu agenda kedepan yang harus dilakukan umat Islam adalah melakukan konsolidasi kedalam yang bertujuan mengkristalisasikan kesatuan "Islam politik" dengan konsep yang jelas, misalnya gagasan tentang "*Baldatun thayibatun warabbun ghafur*".

### 3. Masyarakat Madani dan Implementasinya di Indonesia

Istilah masyarakat madani pertama kali dipopulerkan oleh Prof.Dr. Naquib al-Atas, yang merupakan terjemahan dari kata "*Mujtama Madani*". Secara etimologi masyarakat Madani memiliki dua pengertian yakni "*Masyarakat Kota*" (Madinah) dan "*Masyarakat yang beradab*".<sup>120</sup> Di Indonesia istilah masyarakat madani, paling tidak pertama kali dikemukakan oleh tokoh filsafat Islam Nurcholis Madjid. Bahkan cak Nur sudah mengemukakannya beberapa tahun yang lalu, namun tak begitu berguna dan hanya menjadi pembicaraan dikalangan cencikiawan Muslim. Tidak heran jika pada beberapa saat kemudian perkembangan masyarakat madani menjadi topic yang hangat di negeri jiran Malaysia.

Menurut Fahmi Huwaydi dalam bukunya "Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani Isu-isu besar Politik Islam". Pada dasarnya Negara madani dimunculkan dalam suatu dialog di Kairo. Negara madani menjadi lawan dari Negara Islam, bahkan pembentukan masyarakat madani menjadi bahan

---

<sup>120</sup> Pemahaman Tentang Masyarakat Madani, *Mimbar Dialog Pancasila*, No. 88. Thn.XVI-1998, hal.59.

perbincangan yang sangat gencar diberbagai media di Negara-negara timur tengah.<sup>121</sup>

Istilah masyarakat madani baru muncul belakangan ini karena itu tidak heran jika banyak tokoh agama mengira istilah tersebut ditunjukkan kepada masyarakat madinah yang didalamnya telah berdiri Negara Islam yang pertama, yaitu ujung periode Makkiyah.

Perkembangan pembentukan masyarakat madani, yang banyak dibicarakan sekarang ini, tidak terlepas dari perjalanan pemikiran *civil government* yang sudah digagas sebelumnya oleh Jhon Locke pada tahun 1690. Locke dalam hal ini, memiliki misi menghidupkan masyarakat dalam menghadapi kekuasaan mutlak para raja dan hak-hak istimewa para bangsawan. Dalam hal ini ia berkeinginan membangun pemikiran otoritas umat untuk merealisasikan kemerdekaan dari kekuasaan elite yang memonopoli kekuasaan dan kekayaan.<sup>122</sup>

Dalam konteks komunikasi politik Indonesia, konsep *civil society* atau disebut juga *Masyarakat kewarganegaraan*, merupakan suatu harapan masyarakat untuk menuju masyarakat yang mandiri secara sosial, ekonomi, dan relative bebas dari campur tangan Negara.<sup>123</sup> Oleh karena itu, pembahasan tentang masyarakat madani tidak terlepas dari upaya terbentuknya sistem demokrasi. Konsep masyarakat madani ini memberikan perhatian pada masyarakat untuk mengembangkan sistem demokrasi melalui independensi masyarakat di dalam berhadapan dengan kekuasaan Negara.

---

<sup>121</sup> Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*, Mizan, Bandung, 1999, hal. 295

<sup>122</sup> Adi Suryadi Cula, *Masyarakat MADani, pemikiran, teori dan relevansinya dengan cita-cita Reformasi*, PT. Raja Garafindo Persada, Jakarta, 1999, hal.49

<sup>123</sup> Mimbar Dialog Pancasila, *Op-cit*, hal.56

Seperti yang di ungkap Presiden B.J.Habibie dalam menyambut hari kesaktian pancasila 1 Oktober 1998, bahwa mewujudkan masyarakat madani merupakan langkah kongkret agar kedaulatan rakyat tidak hanya diakui secara abstrak di dalam Undang-undang Dasar tetapi juga hidup segar dalam kenyataan sehari-hari. Menurut B.J.Habibie dalam hal ini pemerintah berfungsi melayani masyarakat dalam segala tingkatan.

Di Indonesia sendiri, perumusan masyarakat madani masih belum sampai pada tahap baku. Apa yang dimasud masyarakat madani yang sesuai kondisi Indonesia belum menemukan kesimpulan. Bayak katagori yang dikumpulkan untuk merumuskan itu. Namun plularisme yang dimiliki Indonesia menjadi modal utama Indonesia untuk membangun masyarakat Madani.

Di bawah kekuasaan rezim Orde Baru di masa lalu, potensi masyarakat madani telah mengalami pengendalian luar biasa, melalui berbagai bentuk represi dan kooptasi, dalam berbagai sektor kehidupan politik, tanpa terkecuali peran komunikasi politik Islam yang didepolitisasi oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat untuk ikut menentukan kebijakan Negara yang menyangkut nasib mereka amat dibatasi, partisipasi politik yang dimungkinkan oleh penguasa lebih cenderung diwarnai model partisipasi yang bersifat otonom. Hampir seluruh elemen potensial yang menjadi basis pertumbuhan masyarakat cenderung diarahkan hanya untuk menjadin penganut rezim yang berkuasa.<sup>124</sup>

Dengan paradigam yang mementingkan stabilitas politik tersebut, maka format politik yang dibangun pemerintah Orde Baru diarahkan kekuatan-kekuatan masyarakat melalui perwakilan kepentingan merupakan strategi penguatan Negara

---

<sup>124</sup> Adi Suryadi Cula, *Op-cit*, hal.214

kemudian diterapkan secara sistematis. Dalam hal ini potensi masyarakat dokooptasi lewat wadah-wadah seperti PWI (persatuan wartawan Indonesia) untuk wartawan, SPSI (serikat pekerja seluruh Indonesia) untuk buruh, HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) untuk petani, (KADIN) kamar dagang dan industry untuk pengusaha, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) untuk pemuda, MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk Ulama, dan sebagainya.<sup>125</sup> Dengan pengkooptasian itu, maka kekuatan-kekuatan masyarakat tidak dapat berfungsi sebagai kontrol kekuasaan efektif.

Proses perubahan politik di Indonesia pasca Orde Baru, telah melahirkan suatu gerakan yang disebut era Reformasi. Sebagaimana aspirasi kritis yang berkembang, masyarakat madani yang sedang bangkit menuntut penghapusan berbagai hambatan struktural yang mengebiri demokrasi.<sup>126</sup> Berbagai bentuk penataan politik yang dilakukan melalui perubahan dan penyusunan perundang-undangan baru dan menghapus peninggalan rezim Orde Baru, misalnya tentang Pemilu, kepartaian, lembaga perwakilan, pers, hubungan pemerintah pusat dan daerah, anti monopoli, tentang KKN (korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan sebagainya, merupakan respon atas tuntutan komunikasi politik yang dilakukan oleh sebagian besar umat Islam, yang menjadi lokomotif perguliran era Reformasi yang menginginkan terbentuknya suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan untuk menunjang masyarakat madani yang memang seharusnya diakomodasi oleh penguasa.<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup> *Ibid*, hal.215

<sup>126</sup> Muhammad As. Hikam, *Politik Kewarganegaraan, LAndasan Redemokratisasi di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal.168.

<sup>127</sup> *Ibid*, hal.218

Sebagai sebuah wacana, masyarakat madani yang sering disepadankan dengan masyarakat sipil (*civil society*), memiliki persamaan dengan konsep masyarakat ideal, yang mengandung muatan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Namun tentu saja tidak sama pada semua masyarakat, karena meskipun ada dasar-dasarnya yang universal, pasti mempunyai nilai-nilai tersendiri. Merujuk pada masyarakat madani di atas yang merupakan suatu konsep komunikasi politik Islam dengan gagasannya yang jelas "*Baldatun Thoyibatun Warabbun Ghafur*", maka kalau kita melihat belakngan ini ditanah air, diperlukan suatu etika yang dapat memberikan kerangka orientasi hidup masyarakat di tengah kemajemukan bangsa, kita sebut saja dengan etika pluralism, yakni suatu gagasan yang didalamnya memuat pandangan bagaimana seharusnya manusia berperilaku dalam masyarakat yang majemuk. Misalnya, pranata sosial yang ada sekarang, sedangkan mengalami proses yang bisa dilihat pada ketidak mampuannya dalam mencegah munculnya berbagai tindak kekerasan dan keresahan sosial.<sup>128</sup>

Terjadinya paradok itu, karena selama ini terdapat perlakuan yang salah terutama yang dilakukan oleh pemerintah, terhadap sistem nilai yang ada dalam masyarakat, seperti kecendrungan pemerintah dalam merespon isu seputar kemajemukan yang bernuansa politis daripada kultural. Selama rezim Orde Baru, kita sering diperingatkan oleh penguasa tentang ancaman bahaya SARA (suku, agama, ras), terutama terhadap keutuhan integrasi bangsa. Dengan pengertian itu nampaknya pemerintah ingin menjadikan isu SARA sebagai payung pengaman, jika sewaktu-waktu terjadi ancaman terhadap integrasi bangsa, tanpa harus bersusah payah dalam mencari akar permasalahan.

---

<sup>128</sup> Syamsul Arifin, *Etika Pluralisme dan Kontruksi Masyarakat Madani, Republika*, 14 Mei 1999. No.125. Thn. Ke-7

Pada dasarnya, konsep masyarakat heterogen dan pluralistik ini, sudah semenjak empat belas abad yang silam diinformasikan oleh Allah SWT melalui surah Al-Hujarat ayat 13 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>129</sup>*

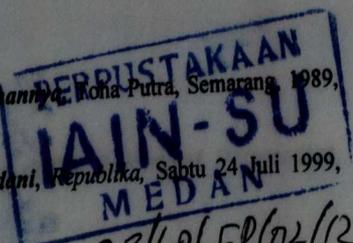
Konsep masyarakat heterogen dan pluralistic yang terdapat dalam suarah Al-Hujarat ayat 13, bukan sekedar dalam hubungan muamalah, tetapi dibarengi dengan hubungan dan nilai *ubudiyah* serta *uluhiyah*, yang menekankan ketakwaan sebagai nilai tambah, yang belum tentu semua bangsa menganutnya misalnya Negara sekuler dan atheis.<sup>130</sup>

Kesuksesan suatu masyarakat mencapai keutuhan dan ketangguhan (*solidity*) adalah tergantung pada keberhasilan mengkondisikan kebersamaan, dan

hal.845

<sup>129</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, Roha Putra, Semarang, 1989,

<sup>130</sup> M. Solly lubis, *Perpektif, Sistem Politik Madani*, Repuolika, Sabtu 24 Juli 1999, No.194. Thn ke-7



kemajuan di antara sesama komponen dan subsistem yang membangun masyarakat madani itu. Kesuksesan masyarakat madani di zaman Rasulullah dikarenakan stuktur sosial, dan kemampuan manajerial yang khas dari Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah yang arief, jujur, adil, amanah, tanpa keserakahan duniawi.

Melihat dinamika sekarang ini, termasuk umat Islam, kita perlu mendefinisikan kembali hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak warga Negara dalam konteks keIndonesiaan. Dalam hal ini yang menjadi parameter adalah Islam<sup>131</sup>. Islam merupakan agama kemanusiaan (*fitrah*), yang membuat cita-cita sejajar dengan cita-cita kemanusiaan universal. Karena cita-cita ke-islam-an yang fitri itu sejalan dengan cita-cita kemanusiaan pada umumnya, begitu juga cita-cita ke-islam-an di Indonesia, juga sejalan dengan cita-cita manusia Indonesia umumnya. Pernyataan ini memang mengimplementasikan adanya kepercayaan tentang kebaikan alami manusia. Pandangan seperti ini adalah salah satu pokok ajaran Islam. Berdasarkan hal ini maka jelaslah bahwa sistem politik yang sebaiknya diterapkan di Indonesia dalam mewujudkan suatu tatanan masyarakat madani atau dengan kata lain menuju suatu Indonesia baru, adalah sistem politik Islam karena sistem itu tidak hanya baik untuk Islam, tetapi baik untuk semua warga Negara Indonesia.

---

<sup>131</sup> . Nur Cholis Madjid, *Cita-Cita Politik Islam di Era Reformasi*, Paramadina, Jakarta, 1999, hlm. 52

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kehancuran "Islam Politik" (depolitisasi) pada masa Orde Baru telah melahirkan orientasi lain bagi Umat Islam, yang diantaranya dilakukan melalui gerakan pemurnian ajaran Islam, guna mencari pijakan baru untuk memainkan peran komunikasi politik Islam dan membangun Umat Islam kontemporer. Orientasi itulah yang pada gilirannya berhasil membangun peran komunikasi politik Islam melalui pendekatan struktural.<sup>132</sup> Dalam hal ini umat Islam banyak memasuki keseluruhan segmen kehidupan politik Indonesia, misalnya melalui Golkar yang merupakan partai politik terbesar pada masa Orde Baru.

Secara tidak langsung dalam kajian komunikasi politik umat Islam pada waktu itu melakukan bentuk komunikasi politik melalui pendekatan propaganda politik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh umat Islam, propaganda yang mereka lakukan kepada pemerintah melalui perubahan perilaku politik yang lebih melunak di bandingkan pada masa Orde Lama.

Ironisnya memang parpol Islam harus menerima kekalahan ditengah 116 juta pemilih yang mayoritas umat Islam. Tentu saja banyak kekecewaan yang muncul dikalangan umat Islam, hal ini disebabkan menurut penulis kurangnya

---

<sup>132</sup> Abdul Azis dkk, *Gerakan Kontemporer di Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1991, hal. 10

figur yang dapat dijadikan contoh, pendidikan politik arus bawah kurang diperhatikan oleh tokoh-tokoh politik Islam dalam menjalankan fungsi perpolitikkannya, sehingga pendekatan pendekatan persuasif dengan pemilih terbesar pada saat itu (masyarakat arus bawah) kurang optimal dilakukan, bentuk komunikasi seperti ini harus dapat diterapkan dengan baik terlebih lagi, jika kondisi sosio kultural masyarakat pemilih masih berada pada lapisan masyarakat kelas bawah.

## B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang ditemukan penulis ingin memberikan beberapa saran, baik kepada para politikus muslim maupun kepada seluruh umat Islam Indonesia. Saran-saran itu menurut penulis akan berguna bagi kepentingan komunikasi politik umat Islam di Indonesia kedepan.

Umat Islam Indonesia yang merupakan bagian warga Negara mayoritas, merupakan bagian dari masyarakat yang majemuk, terdiri dari berbagai latar belakang budaya, agama, visi, dan pemahaman yang semuanya mempunyai kepentingan politik berbeda pula. Dalam hal ini umat Islam perlu bersatu dalam visi politik walaupun warna baju politik berbeda-beda demi terciptanya suatu kekuatan Islam yang besar, dalam menegakkan misi "amar Ma'ruf nahi mungkar" dibawah satu bendera konsep politik Islam "Baladun Thoyibatun Warabbun Ghafur".

Islam sebagai suatu agama yang ajarannya sangat kompleks, hendaknya dapat dijadikan pedoman oleh para politikus muslim untuk memberikan suatu format gerakan yang jelas, sehingga Islam dapat menyelamatkan bangsa ini dari musibah krisis moral, politik, hukum, ekonomi dan disintegrasi bangsa Indonesia.

Bagi mereka yang menjadi pemain utama dalam pemerintah, hendaknya jangan lagi nenaruh curiga terhadap format gerakan politik Islam, karena umat Islam bukanlah musuh, tetapi warga Negara mayoritas yang menopang tegaknya Republik Indonesia.

Dalam memasuki era baru ini, bagi mereka yang mempunyai kemampuan kiranya perlu mengadakan terobosan-terobosan komunikasi politik terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya umat Islam untuk mengisi semua aspek kehidupan, ini perlu dilakukan agar umat Islam tidak tertinggal oleh umat lain yang tidak menginginkan umat Islam itu maju, agar sejarah kekalahan umat Islam tidak terualang untuk kesekian kalinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Syafi'i Ma'arif, *Islam Dan Politik*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996
- A. Syafi'i Ma'arif, Kata Pengantar Dalam M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1983
- Abdul Azis Dkk, *Gerakan Kontemporer Di Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1991
- Abdul Azis Thaba, *Islam Dan Negara Politik Orde Baru*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996
- Abdul Aziz Thaha, *Islam Dan Negara*, Gema Insan Press, Jakarta, 1996
- Abdul Aziz Thaha, *Islam Dan Negara*, Graha Insani Pres, Jakarta, 1996
- Abdul Rahman Bin Haji Abdullah, *Pemikiran Islam Masa Kini, Sejarah Dan Aliran*, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1987
- Abu A'la Al-Maududi, *Khilafah Dan Kerajaan* (Terjemah. Muhammad Al-Baqir) Mizan, Bandung, 1996
- Abu A'la Al-Maududi, *Khilafah Dan Kerajaan*, (Terjemah, Muhammad Al-Baqir), Mizan, Bandung, 1996
- Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Terjemahan Asep Hikmat), Mizan, Bandung, 1995
- Abu Bakar E. Hara, *Parpol Islam Dan Kelanjutan Era Reformasi*, *Republika*, Jum'at 23 Juli 1999, No.153. Thn. Ke-7
- Adi Suryadi Cula, *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori Dan Relevansinya Dengan Cita-Cita Reformasi*, Pt. Raja Garafindo Persada, Jakarta, 1999
- Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hambal*, Juz Iii, Al-Maktabah Al-Islami, Bierut, Cet, Ii, 1398 H./ 1978 M
- Ahmad Syalabi, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, (Terjemah, Mukhtar Yahya), Pustaka Al-Husna, Jakarta, Cet. Iv. 1990
- Al-Chaidar, *Reformasi Prematur*, Darul Falah, Jakarta, 1998
- Al-Chair, *Pemilu 1999, Pertarungan Ideologi Partai-Partai Islam Versus, Partai-Partai Sekuler*, Jakarta, Darul Falah, Cetakan I, 1998
- Al-Chair, *Reformasi Prematur, Jawaban Terhadap Reformasi Total*, Darul Falah, Jakarta, Cetakan Iii,

Al-Gazhali, *Mutiara Ihya Lulumudin*, (Terjemah, Irwan Kuniawan), Mizan Bandung, Cet, I, 1997

Bachtiar Efendy, *Islam Dan Negara, Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1998

Dan Nimmo, *Political Communication And Public Opinion In America*, Goodyear Publication, Santa Monica, 1978

Dedy Djamaludin Malik & Yosol Iriantana, *Komunikasi Persuasif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994

Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Tiha Putra, Semarang, 1989

Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1989

Don F-R Wayne Pace Faules, *Komunikasi Organisasi; Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, Rosda Karya, Bandung, 2006

Don F-R Wayne Pace Faules, *Komunikasi Organisasi; Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, Rosda Karya, Bandung, 2006

Eep Saefullah Fatah, *Membangun Oposisi Agenda-Agenda Perubahan Politik Masa Depan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999

Eep Saefullah, *Memahami Posisi Politik Umat Islam*, *Republika*, Jum'at 23 Juli 1999, No.153, Thn. Ke-7.

Etin Nurhaetin Ningrum, *Dinamika Suara Partai & Strategi Pemenagan Pemilu*, Kencana Mas Publishing Ouse, Jakarta, 2005

Etin Nurhaetin Ningrum, *Dinamika Suara Partai & Strategi Pemenagan Pemilu*, Kencana Mas Publishing Ouse, Jakarta, 2005

Fachry Ali Dan Bachtiar Efendi, *Merabah Jalan Baru Islam, Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Bandung Mizan, Cetakan Ii, 1986

Faisal Ismail, *Ideologi, Hegemoni Dan Otoritas Agama*, (Terjemahan, Imron Rosyidi), Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999

Farid Wajdi, *Kalah Menang Bagi Parpol Islam*, *Republika*, Rabu 30 Juni 1999, No.170 Thn.Ke-7

Fuad Muhammad Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1988

Hafied Cangara, *Komunikasi Politik*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Hafied Cangara, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori, Dan Strategi*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Hafied Cangara, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori, Dan Strategi*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, Jilid I, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985

Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, Cet Xi, 1996

Ibnu Hamad, *Komunikasi Sebagai Wacana*, La Tofi Enterprise, Jakarta, 2010

Ibnu Taimiyah, *Jalan Lurus Menuju Sorga*, (Terjemah, Halimuddin), Rineka Cipta, Jakarta, Cet, I

J.Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Sejarah Dan Pemikiran*, Rajawali Pers, Jakarta, Cet. I. 1994

James W.Jr,Tankarad, Severin J Wenner, *Teori Komunikasi Sejarah, Metode Dan Terapan Di Dalam Media Massa*, Kencana Perdana Media Gorup, Jakarta,2007

Khalid Ibrahim Jindan , *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Terjemah, Masrohin), Risalah Gusti, Surabaya, 1995

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, (Terjemah, Mufid) Rineka Cipta, Jakarta, Cet. I

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi, Untuk Aksi*, Bandung, Mizan, 1991

Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Mizan, Bandung, 1997, Hal, 141.

Lingkar Anggoro, *Teori Dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya Di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000

M. Amin Rais, *Membangun Politik Adi Luhung, Membumikan Tauhid Sosial Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*, Zaman Wacana Mulia, Bandung, 1998

M. Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, Cet, Viii, 1998

M. Solly Lubis, *Perpektif, Sistem Politik Madani, Republika*, Sabtu 24 Juli 1999, No.194. Thn Ke-7

M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1995, Hal.179-180

M.Amin Rais, *Dari Yogya Ke Bina Graha*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999

M.Ridwan Lubis Dan Muhammad Syahminan, *Prospek Pembaharuan Pemikiran Islam*, Pustaka Widayasarana, Medan, Cet, I, 1994

M.Rusli Karim, *Dinamika Islam Indonesia, Suatu Tinjauan Sosial Dan Politik*, Hanindita, Yogyakarta, 1985

M.Rusli Karim, *Islam Dan Sejarah Orde Baru, Republika*, Jum'at, 22 Desember 1996

M.Rusli, *Partai Politik Indonesia Sebuah Pasang Surut*, Rajawali Press, Jakarta, 1993

Meriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2008

Meriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2008

Mochtar Naim, *Kekalahan Partai Politik Islam, Republika*, Selasa 15 Juli 1999, No.183 Thn. Ke-7.

Muhammad As. Hikam, *Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1999

Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam Dan Barat*, Rajawali Pers, Jakarta, Cet. I 1996

Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam Dan Barat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996

Muhammad Hasan Kamal, *Modernisasi Indonesia Respon Cendekiawan Muslim*, (Terjemahan, Ahmadie Thaha), Lingkaran Studi Indonesia, Jakarta, 1987

Muhammad Husein Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Terjemah, Ali Audan), Pustaka Lentera Antar Nusa, Jakarta, Cet, Ixx, 1996

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Terjemah, Lentera Basri Tama), Jakarta, Cet, li, 1996

Muhibbin, *Hadits-Hadist Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet, I, 1996

Munawir Sadzali, *Islam Dan Tatanegara*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990

Nanik Ismaini, *Periklanan Partai Politik, Menterjemahkan Pesan Rasional Dengan Eksekusi Yang Relevan Dan Emosional*, Dalam Prof.Dr. Harsono Suwardi, Et, *Politik, Demokrasi & Manajemen Komunikasi*, Galang, Press, Bandung, 2002

Noeng Muhajir, *Methodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarahi. Yogyakarta, Cet. Ii, 1990

Nurcholis Madjid, *Tradisi Islam*, Yayasan Wakaf Paramadina, 1997

Nurcholis Majid, *Islam Keindonesiaan*, Mizan, Bandung, Cet, iii, 1998

Nur Cholis Majid, *Cita-Cita Politik Islam di Era Reformasi*, Paramadina, Jakarta, 1999

Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Pemahaman Tentang Masyarakat Madani, *Mimbar Dialog Pancasila*, No. 88. *Thn.Xvi-1998* Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi Dan Masyarakat Madani*, Mizan, Bandung, 199

Sayyid Qutub, *Islam Dan Perdamaian Dunia* (Terjemahan Asep Hikmat), Pustaka Firdaus, Jakarta, 1987

Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru, Perubahan Politik Dan Keagamaan*, Pt. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993

Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Syamsul Arifin, *Etika Pluralisme Dan Kontruksi Masyarakat Madani*, *Republika*, 14 Mei 1999. No.125. Thn. Ke-7

Syamsul Arifin, *Kristalisasi Kekuatan Islam Politik*, *Republika*, Jum'at 27 Agustus 1999, No.227. Thn. Ke-7

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1988

Umar Hasyim, *Apakah Anda Termasuk Golongan Sunnah Wal-Jama'ah?*, Bina Ilmu Surabaya, Cet. 1978

W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988